



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020**



Pangkalpinang  
kota beribu  
senyuman

**Pemerintah Kota Pangkalpinang  
Tahun 2021**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang mengatur kehidupan dengan bijaksana. Atas karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini melaporkan pencapaian target kinerja pemerintah daerah yang telah diperjanjikan pada tahun 2020, yang diukur dari Indikator Kinerja Utama yang mendukung pencapaian sasaran pada visi dan misi Daerah. Laporan ini juga menyajikan informasi akuntabilitas Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengelola manajemen kinerja, dengan merumuskan indikator yang tepat untuk setiap sasaran yang ada dalam RPJMD secara berjenjang hingga unit organisasi terendah dan menetapkan target kinerja yang rasional.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan manajemen kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Akhirnya kami mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan LAKIP Kota Pangkalpinang untuk masa-masa selanjutnya. Diharapkan laporan ini akan menjadi tolok ukur kinerja dan dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Pemerintah

Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mendorong percepatan terwujudnya *good governance*, tertib bertanggung jawab dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme .

**PANGKALPINANG, MARET 2021**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**



**H. MAULAN AKLIL**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *GoodGovernance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020, yang diformulasikan dari hasil Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Setiap Perangkat Daerah maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*GoodGovernance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023 telah menetapkan 5 (Lima) misi, 8 (Delapan) tujuan, dan 33 (Tiga Puluh Tiga) indikator sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 yang tersebar di dalam 82 (delapan puluh dua) Program Daerah, dengan dana sebesar **Rp. 572.195.978.060,00** terealisasi **Rp. 503.147.266.789,00** dengan capaian kinerja anggaran 87,93 % dari 22 (dua puluh dua) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pangkalpinang Tahun 2020 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

# DAFTAR ISI

## Halaman

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                    | <b>1</b>  |
| <b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>                                                                | <b>1</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                        | <b>1</b>  |
| <br>                                                                                           |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                       | 1         |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                                                    | 2         |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                                                        | 4         |
| 1.4 Gambaran Umum Daerah.....                                                                  | 5         |
| 1.4.1 Wilayah Administratif .....                                                              | 5         |
| 1.4.2 Kependudukan .....                                                                       | 11        |
| 1.4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang ...                                               | 13        |
| 1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia .....                                                         | 15        |
| 1.4.5 Struktur Organisasi .....                                                                | 20        |
| 1.4.6 Kondisi Kepegawaian Daerah .....                                                         | 20        |
| 1.5 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....                                       | 22        |
| <br>                                                                                           |           |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>                                          | <b>35</b> |
| 2.1 Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah<br>(RPJMD) Kota Pangkalpinang 2018-2023 .... | 35        |
| 2.1.1 Visi dan Misi Kota Pangkalpinang ...                                                     | 36        |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....                                                                 | 40        |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama .....                                                              | 43        |
| 2.3 Perjanjian Kinerja .....                                                                   | 50        |

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                      | <b>53</b>      |
| 3.1 Capaian Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020...                            | 55             |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota<br>Pangkalpinang .....             | 59             |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                                                    | 146            |
| <br><b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                 | <br><b>149</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                 |                |
| 1. Pernyataan Telah direviu oleh Inspektorat Kota Pangkalpinang                 |                |
| 2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kota<br>Pangkalpinang Tahun 2020 |                |
| 3. Perjanjian Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020                             |                |
| 4. Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan IKU Kota<br>Pangkalpinang         |                |
| 5. Rincian Program dan Kegiatan pada setiap sasaran                             |                |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1. LATAR BELAKANG

Paradigma baru tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut Pemerintah Daerah untuk responsif, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, partisipatif, melaksanakan kebijakan sesuai hukum yang berlaku, konsensus dalam menjalankan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dan harus memiliki *mindset* bahwa aparat pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat.

Keharusan pengukuran akuntabilitas pemerintah daerah disebabkan karena pemerintah menjadi aktor utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan, yaitu *regulation*, *empowerment*, *protection*, dan *public services*. Selain itu, sudah menjadi kewajiban pimpinan organisasi untuk mempertanggungjawabkan, mempertanggunggugatkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya.

Pertanggungjawaban kinerja birokrasi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan dua perspektif. Dalam perspektif administrasi, kinerja birokrasi pemerintah daerah dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah dan Pemerintah tingkat atasnya. Sedangkan dalam perspektif *good governance*, kinerja pemerintah daerah dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Kota Pangkalpinang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan

Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.8/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2).

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Kota Pangkalpinang merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan yang berisi informasi pengukuran kinerja, yang menggambarkan apakah Pemerintah Daerah berhasil atau gagal dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang berdampak pada progres tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkalpinang.

Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas Instansi
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang (baik program maupun sumber daya organisasi/instansi)
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi
7. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik
8. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Laporan Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020 adalah :

1. Uraian singkat tentang Gambaran Umum Daerah;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumberdaya

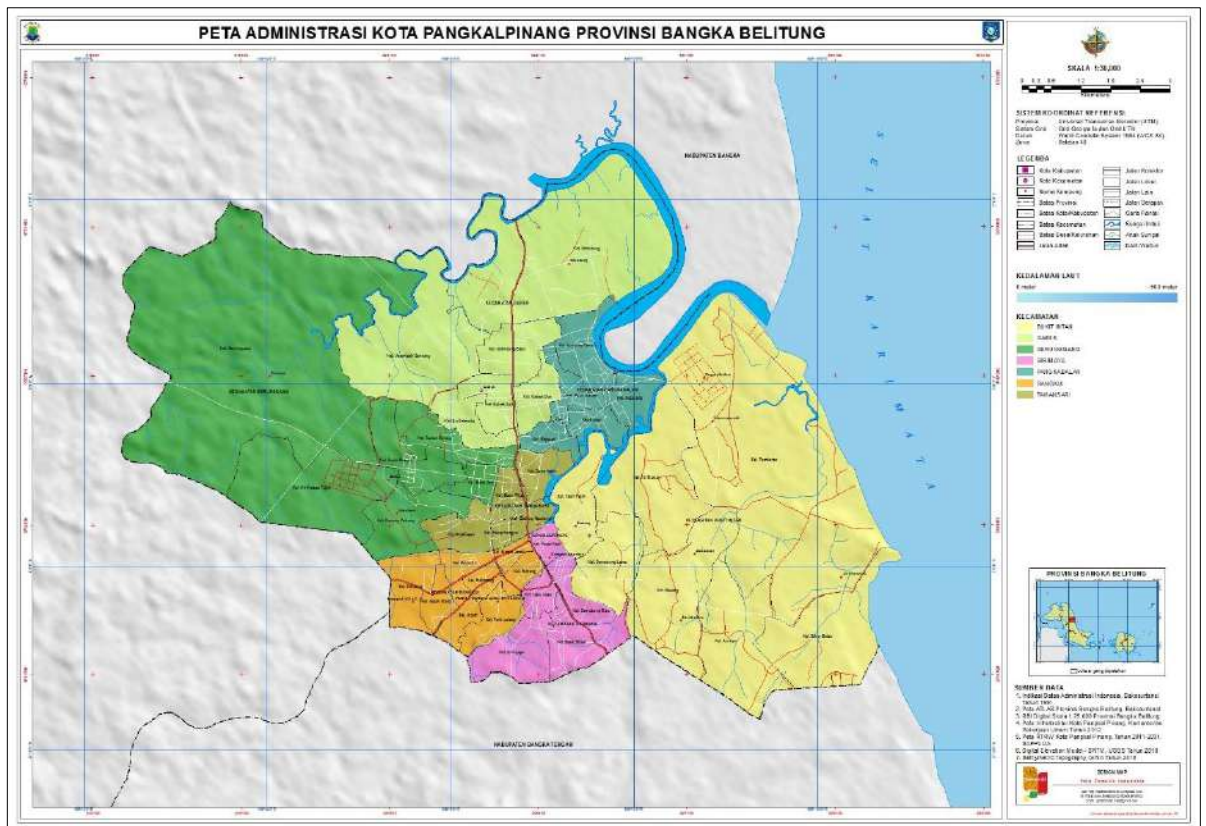
## **1.4 GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1.4.1 Wilayah Administratif**

#### **Kondisi Geografi dan Demografi**

Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 118,41 km<sup>2</sup>. Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangka
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangka



**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kota Pangkalpinang**

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota provinsi Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang**

| KECAMATAN   | KELURAHAN           | KECAMATAN    | KELURAHAN          |
|-------------|---------------------|--------------|--------------------|
| BUKIT INTAN | 1. Air Itam         | PANGKALBALAM | 1. Ampui           |
|             | 2. Air Mawar        |              | 2. Lontong Pancur  |
|             | 3. Bacang           |              | 3. Lontong Pancur  |
|             | 4. Pasir Putih      |              | 4. Pasir Garam     |
|             | 5. Semabung Lama    |              | 5. Rejosari        |
|             | 6. Sinar Bulan      | RANGKUI      | 1. Asam            |
|             | 7. Temberan         |              | 2. Bintang         |
| GABEK       | 1. Air Selemba      |              | 3. Gajah Mada      |
|             | 2. Gabek Dua        |              | 4. Keramat         |
|             | 3. Gabek Satu       |              | 5. Masjid Jamik    |
|             | 4. Jerambah Gantung |              | 6. Melintang       |
|             | 5. Selindung        |              | 7. Parit Lalang    |
|             | 6. Selindung Baru   |              | 8. Pintu Air       |
| GERUNGGANG  | 1. Air Kepala Tujuh | TAMANSARI    | 1. Batin Tikal     |
|             | 2. Bukit Merapin    |              | 2. Gedung Nasional |
|             | 3. Bukit Sari       |              | 3. Kejaksaan       |
|             | 4. Kacang Pedang    |              | 4. Opas Indah      |
|             | 5. Taman Bunga      |              | 5. Rawa Bangun     |
|             | 6. Tua Tunu Indah   |              |                    |
| GIRIMAYA    | 1. Batu Intan       |              |                    |
|             | 2. Bukit Besar      |              |                    |
|             | 3. Pasar Padi       |              |                    |
|             | 4. Semabung Baru    |              |                    |
|             | 5. Sriwijaya        |              |                    |

*Sumber : PERDA Kota Pangkalpinang No. 02 Tahun 2011*

Terkait dengan luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sesuai yang tertera dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2017 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sebesar 29,01 km<sup>2</sup>. Hingga saat ini belum terdapat penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Letak Astronomis dan Geografis**

Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah administratif dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°04'–02°10' LS dan 106°04'–106°07' BT. Ditinjau dari aspek geografisnya, Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi yang mempunyai fungsi sebagai pusat

aktivitas berbagai bidang. Dalam perkembangannya sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang dan dinamika berbagai aspek maupun masyarakatnya. Selain pertumbuhan fisik, pada tahun 2007 wilayah Kota Pangkalpinang telah mengalami perluasan dari 89,4 km<sup>2</sup> menjadi 118,408 km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung.

### **Kondisi Topografi**

Keadaan bentang alam yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada umumnya memiliki kemiripan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun atas dataran rendah maupun tinggi. Kota Pangkalpinang memiliki profil bentang alam yang beragam berupa dataran dengan kondisi berbukit. Kontur wilayah Kota Pangkalpinang pada umumnya bergelombang dengan ketinggian antara 20-50 m dari permukaan laut dan kemiringan 0-25 %. Daerah-daerah yang berbukit berada di bagian Barat dan Selatan Pangkalpinang, diantaranya Bukit Girimaya dan Bukit Menara.

Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m DPL), yang terbagi ke dalam lima kelas yaitu: 0-5 m DPL, 5-15 m DPL, 15-30 m DPL, 30-45 m DPL, dan 45-70 m DPL. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m DPL. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m DPL. Sedangkan ketinggian 30-70 m DPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit

Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kelas lereng 0-2 % (topografi sangat datar hingga cekungan), Tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Wilayah dengan kelerengan ini terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), Lokasinya mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 8-15 % (topografi landai agak miring), Merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 15-25 % (topografi agak curam), Terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 25-40 % (topografi curam), Terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), Terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

### **Kondisi Geologi dan Struktur Tanah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda. Struktur geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota

Pangkalpinang terdiri dari beberapa formasi batuan antara lain batuan malihan (sekis dan gneis) sebagai batuan tertua.

Struktur geologi di Kota Pangkalpinang secara umum terdiri dari formasi tertua berupa batu kapur berumur Permo Karbon, menyusul Slate berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granis hingga diorit dengan inklusi mineral berwarna yaitu Biotit, dan ada kalanya Amfibol Hijau.

Jika dilihat secara morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok pada bagian Barat hingga Selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang pada dasarnya berbentuk cekung, dimana bagian pusat kota lebih rendah. Keadaan ini memberikan dampak negatif, seperti wilayah Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.

### **Kondisi Klimatologi**

Menurut pengamatan unsur iklim di Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang keadaan suhu minimum daerah Kota Pangkalpinang sebesar 23,4°C sedangkan suhu maksimum sebesar 32,1°C. Sehingga suhu udara rata-rata sebesar 27,1°C selama Tahun 2020. Selama Tahun 2020 kelembaban udara di wilayah Pangkalpinang rata-rata sebesar 83 persen. Kelembaban udara minimal sebesar 61 persen, sedangkan tertinggi sebesar 96 persen. Kecepatan angin Tahun 2019 berkisar antara 0,0 sampai dengan 7,7 knot, dengan rata-rata 2,5 knot. Tekanan Udara minimum sebesar 1.005 mb sedangkan tekanan udara maksimum sebesar 1.010,4 mb, dengan rata-rata 1.005,6 mb.

Lama penyinaran matahari pada tahun 2020 di wilayah Pangkalpinang adalah 47,4 persen. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 254 hari hujan, dengan jumlah curah hujan sebesar 2.705,9 mm. Secara rinci data kondisi cuaca di Kota Pangkalpinang ditampilkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

| No | Uraian                  | 2018    | 2019    | 2020    |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Suhu (°C)               | 27      | 27,3    | 27,1    |
| 2  | Kelembaban Udara (%)    | 81,9    | 80,3    | 83      |
| 3  | Tekanan Udara (mb)      | 1.009,7 | 1.010,1 | 1.005,6 |
| 4  | Penyinaran Matahari (%) | 54,3    | 58,9    | 47,4    |
| 5  | Kecepatan Angin (knots) | 4,8     | 2,8     | 2,5     |
| 6  | Curah Hujan (hh)        | 210     | 196     | 254     |

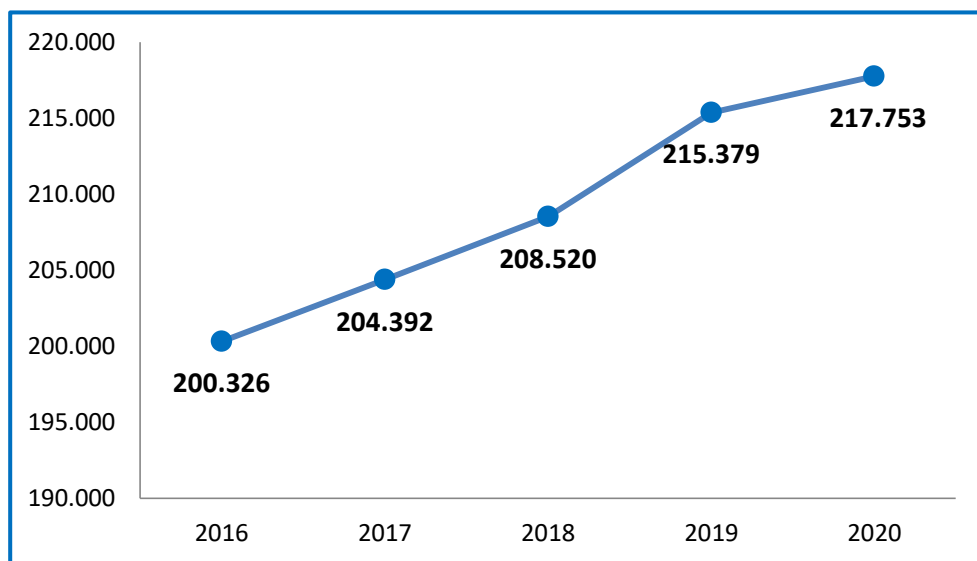
*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkalpinang Dalam Angka 2021*

#### **1.4.2 Kependudukan**

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang memiliki tren meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 215.379 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,29 persen. Angka ini merupakan capaian tertinggi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5

tahun terakhir sehingga perlu adanya evaluasi kembali terkait perencanaan keluarga sejahtera melalui program keluarga berencana.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2020

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019-2020 mencapai 1,10. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Gabek sebesar 4,54 sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamansari yang hanya mencapai -2,23. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang per Kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan**  
**Tahun 2020**

| KECAMATAN   | PENDUDUK TAHUN 2019 | PENDUDUK TAHUN 2020 | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%) |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                   | 3                   | 4                             |
| BUKIT INTAN | 38.318              | 38.798              | 1,24                          |

|                      |                |                |             |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>TAMANSARI</b>     | 21.283         | 20.814         | -2,23       |
| <b>PANGKALBALAM</b>  | 22.567         | 22.384         | -0,81       |
| <b>RANGKUI</b>       | 38.724         | 38.296         | -1,11       |
| <b>GERUNGANG</b>     | 43.768         | 45.370         | 3,59        |
| <b>GABEK</b>         | 31.482         | 32.944         | 4,54        |
| <b>GIRIMAYA</b>      | 19.237         | 19.147         | -0,47       |
| <b>PANGKALPINANG</b> | <b>215.379</b> | <b>217.753</b> | <b>1,10</b> |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2020

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 1.839 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.629 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Gabek yang hanya mencapai 963 jiwa per km<sup>2</sup>, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2020**

| No                        | Kecamatan    | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Penduduk Tahun 2020 | Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1.                        | Rangkui      | 5,02                            | 38.296              | 7.629                                  |
| 2.                        | Bukit Intan  | 35,65                           | 38.798              | 1.088                                  |
| 3.                        | Girimaya     | 4,74                            | 19.147              | 4.039                                  |
| 4.                        | Pangkalbalam | 4,68                            | 22.384              | 4.783                                  |
| 5.                        | Gabek        | 34,21                           | 32.944              | 963                                    |
| 6.                        | Tamansari    | 3,18                            | 20.814              | 6.545                                  |
| 7.                        | Gerunggang   | 30,93                           | 45.370              | 1.467                                  |
| <b>Kota Pangkalpinang</b> |              | <b>118,41</b>                   | <b>217.753</b>      | <b>1.839</b>                           |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2020

### 1.4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang

#### Pendekatan PDRB Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang diperoleh dari perkembangan **PDRB atas dasarhargakonstan** merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu daerah. Artinya dengan PDRB atas dasar harga

konstan dapat dilihat perkembangan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (tahun dasar 2010). Dengan menggunakan faktor pengali harga konstan, sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil perekonomian, yang dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro.

Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas harga konstan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 mencapai 3,34%, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yang sekitar 5,07%.

**Tabel 1.6**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2017- 2019**

| Sektor PDRB                                                    | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah) |       |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                | 2019                                                            | 2018  | 2017  |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 3,15                                                            | 8,68  | -5,00 |
| Pertambangan dan Penggalian                                    | -                                                               | -     | -     |
| Industri Pengolahan                                            | -10,85                                                          | -3,57 | 3,47  |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 31,28                                                           | 6,47  | 4,88  |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 3,71                                                            | -3,57 | 7,61  |
| Konstruksi                                                     | 11,18                                                           | 6,36  | 6,71  |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 2,63                                                            | -4,98 | 6,62  |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 4,78                                                            | 7,23  | 8,54  |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 12,85                                                           | 5,38  | 6,30  |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 16,30                                                           | 13,42 | 9,11  |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5,26                                                            | 9,97  | 2,59  |
| Real Estate                                                    | 2,16                                                            | 9,29  | 4,70  |
| Jasa Perusahaan                                                | 2,26                                                            | 6,89  | 2,08  |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,99                                                            | 9,88  | 4,98  |
| Jasa Pendidikan                                                | 8,74                                                            | 9,50  | 4,57  |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 10,77                                                           | 4,66  | 8,08  |
| Jasa lainnya                                                   | 10,98                                                           | 8,09  | 9,46  |
| Produk Domestik Regional Bruto                                 | 3,34                                                            | 5,07  | 5,19  |

**Tabel 1.7**  
**Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran, 2017- 2019**

|  Badan Pusat Statistik<br>KOTA PANGKALPINANG<br>Sektor PDRB Pengeluaran | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen) |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                          | 2019                                               | 2018 | 2017 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga                                                                                                                        | 5,97                                               | 6,14 | 5,38 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT                                                                                                                               | 11,42                                              | 7,77 | 6,52 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah                                                                                                                          | 2,43                                               | 1,99 | 6,53 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                                                                                            | 6,59                                               | 6,23 | 7,96 |
| Perubahan Inventori                                                                                                                                      | -                                                  | -    | -    |
| Net Ekspor Barang dan Jasa                                                                                                                               | -                                                  | -    | -    |
| PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO                                                                                                                           | 3,34                                               | 5,07 | 5,19 |

#### 1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia dipahami sebagai pembangunan yang lebih luas dan mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan alat daripembangunan.

Dalam pengertian *United Nation Development Programme (UNDP)*, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan manusia juga didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk.

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmupengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pilihan lain yang takkalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang penduduk agar dapat hidup layak.

Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas- luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan umur panjang, berpendidikan dan berketerampilan, serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Agar semua konsep yang luas dan menyeluruh yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan sampai kebebasan demokratis dan kualitas hidup yang disebut pembangunan manusia tersebut dapat diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat dipantau dan diukur dengan mudah yang diterjemahkan ke dalam data statistik.

Level IPM Kota Pangkalpinang tahun 2020 mencapai 78,22 berada pada peringkat ke satu dari tujuh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 1.8**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru, 2018-2020**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

| Wilayah Babel <br><small>BADAN PUSAT STATISTIK<br/> PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</small> | Indeks Pembangunan Manusia |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                 | 2020 <sup>↑↓</sup>         | 2019 <sup>↑↓</sup> | 2018 <sup>↑</sup> |
| Kepulauan Bangka Belitung                                                                                                                                                       | 71,47                      | 71,30              | 70,67             |
| Bangka                                                                                                                                                                          | 72,40                      | 72,39              | 71,80             |
| Belitung                                                                                                                                                                        | 72,51                      | 72,46              | 71,70             |
| Bangka Barat                                                                                                                                                                    | 69,08                      | 69,05              | 68,68             |
| Bangka Tengah                                                                                                                                                                   | 70,45                      | 70,33              | 69,52             |
| Bangka Selatan                                                                                                                                                                  | 66,90                      | 66,54              | 65,98             |
| Belitung Timur                                                                                                                                                                  | 70,92                      | 70,84              | 70,22             |
| Kota Pangkalpinang                                                                                                                                                              | 78,22                      | 77,97              | 77,43             |
| Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                      |                            |                    |                   |

Sehingga berdasarkan klasifikasi capaian IPM Kota Pangkalpinang berada pada posisi tinggi, dan berada pada peringkat ke satu dari tujuh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indeks Pembangunan Manusia disusun dari tiga komponen yaitu:

1. Lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saatlahir,
2. Tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara rata-rata lama sekolah pada penduduk dewasa (dengan bobot sepertiga) dan harapan lama sekolah (dengan bobot sepertiga),
3. Dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

**Tabel 1.9**  
**Angka Harapan Hidup**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020**

| Wilayah Babel             | Angka Harapan Hidup |       |       |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|
|                           | 2020                | 2019  | 2018  |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70,64               | 70,50 | 70,18 |
| Bangka                    | 71,06               | 70,99 | 70,73 |
| Belitung                  | 71,05               | 70,94 | 70,64 |
| Bangka Barat              | 70,06               | 69,99 | 69,73 |
| Bangka Tengah             | 71,36               | 71,16 | 70,78 |
| Bangka Selatan            | 68,16               | 67,90 | 67,47 |
| Belitung Timur            | 72,03               | 71,90 | 71,59 |
| Kota Pangkalpinang        | 73,30               | 73,17 | 72,86 |

Berdasarkan data di atas, angka harapan hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020 menempati urutan pertama dari seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menggambarkan tujuan pembangunan manusia yang mengupayakan “usia hidup” yang panjang dan sehat telah tercapai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**Tabel 1.10**  
**Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020**

| Wilayah Babel             | Rata-Rata Lama Sekolah<br>(Tahun) |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------|------|------|
|                           | 2020                              | 2019 | 2018 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 8,06                              | 7,98 | 7,84 |
| Bangka                    | 8,24                              | 8,23 | 8,20 |
| Belitung                  | 8,46                              | 8,41 | 8,15 |
| Bangka Barat              | 7,22                              | 7,21 | 7,18 |
| Bangka Tengah             | 7,19                              | 7,13 | 6,80 |
| Bangka Selatan            | 6,67                              | 6,42 | 6,36 |
| Belitung Timur            | 8,22                              | 8,15 | 8,14 |
| Kota Pangkalpinang        | 9,92                              | 9,80 | 9,78 |

### **PENGELUARAN PER KAPITA – Rp 15.663.000**

Artinya rata-rata satu individu di Kota Pangkalpinang mengeluarkan uang selama setahun mencapai 15,66 Juta Rupiah untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Pengeluaran ini menjadi pengeluaran tertinggi di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Kondisi ini disebabkan oleh gaya hidup perkotaan yang lebih bervariasi dalam pola konsumsinya.

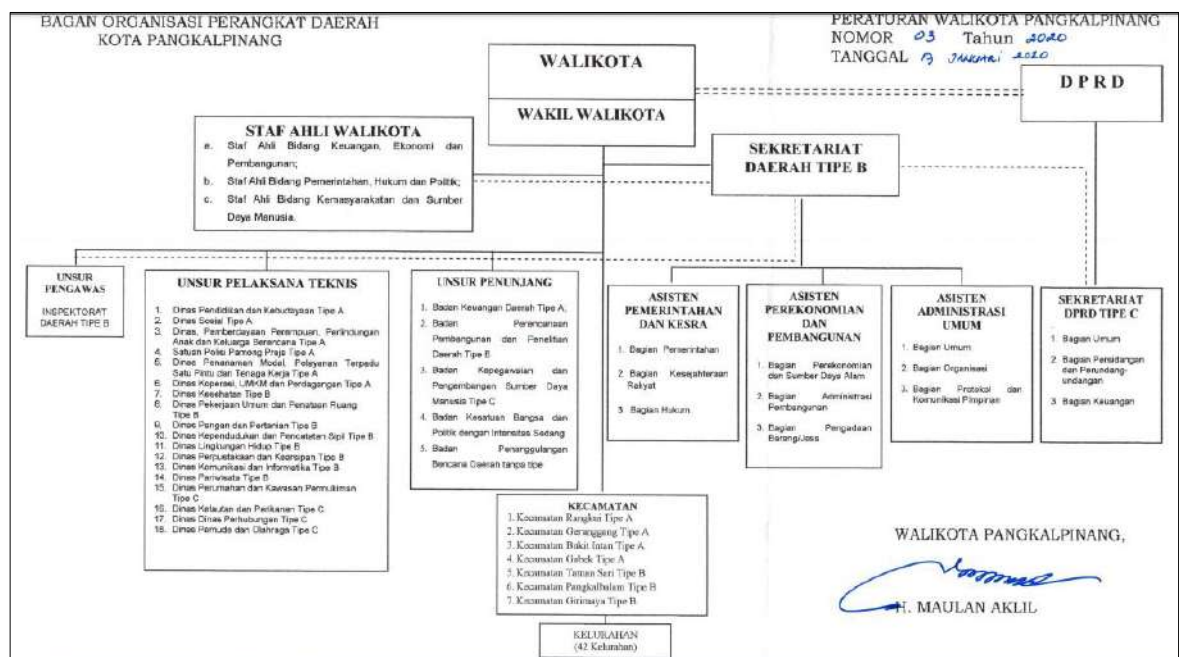
**Tabel 1.11**  
**Pendapatan Perkapita**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020**

| Wilayah       | Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) |        |        |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------|
|               | 2020                                | 2019   | 2018   |
| Pangkalpinang | 15 663                              | 15 883 | 15 560 |

### 1.4.5 Struktur Organisasi

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami penambahan perangkat daerah yang mulai efektif menjalankan tugas di tahun anggaran 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Adapun penambahan perangkat daerah tersebut; Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga dari semula 30 Perangkat daerah, menjadi 33 Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada bagan berikut :



### 1.4.5 Kondisi Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Reformasi Birokrasi sekarang ini, sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara adalah hal yang tak kalah pentingnya. Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan diperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah dapat dicapai. Adapun Total ASN di Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 2.993 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.12**  
**Jumlah PNS per PDDi Lingkungan Pemkot Pangkalpinang**  
**Tahun 2020**

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH                                                | PNS BERDASARKAN<br>JENIS KELAMIN |        | JUMLAH |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                      | PRIA                             | WANITA |        |
| 1   | Sekretariat Daerah                                                   | 43                               | 42     | 85     |
| 2   | Sekretariat DPRD                                                     | 20                               | 12     | 32     |
| 3   | Inspektorat                                                          | 15                               | 21     | 36     |
| 4   | Badan Keuangan Daerah                                                | 43                               | 27     | 70     |
| 5   | Badan Perencanaan Pembangunan,<br>Penelitian dan Pengembangan Daerah | 21                               | 11     | 32     |
| 6   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia Daerah     | 15                               | 12     | 27     |
| 7   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                  | 18                               | 4      | 22     |
| 8   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 15                               | 9      | 24     |
| 9   | Dinas Lingkungan Hidup                                               | 26                               | 11     | 37     |
| 10  | Dinas Kesehatan                                                      | 151                              | 601    | 752    |
| 11  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                      | 275                              | 767    | 1.042  |
| 12  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 7                                | 13     | 20     |
| 13  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                     | 19                               | 12     | 31     |
| 14  | Dinas Perhubungan                                                    | 27                               | 3      | 30     |
| 15  | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan                                 | 40                               | 16     | 56     |

|    |                                                                     |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             | 40    | 11    | 51    |
| 17 | Dinas Perumahan dan Permukiman                                      | 20    | 11    | 31    |
| 18 | Dinas Sosial                                                        | 12    | 20    | 32    |
| 19 | Dinas Pariwisata                                                    | 7     | 18    | 25    |
| 20 | Dinas Pangan dan Pertanian                                          | 28    | 14    | 42    |
| 21 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 16    | 25    | 41    |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                    | 10    | 21    | 31    |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB              | 5     | 27    | 32    |
| 24 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                        | 9     | 10    | 19    |
| 25 | Dinas Pemuda dan Olahraga                                           | 13    | 3     | 16    |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja                                          | 40    | 4     | 44    |
| 27 | Kecamatan Taman sari                                                | 24    | 18    | 42    |
| 28 | Kecamatan Gerunggang                                                | 20    | 27    | 47    |
| 29 | Kecamatan Rangkui                                                   | 38    | 26    | 64    |
| 30 | Kecamatan Pangkalbalam                                              | 28    | 14    | 42    |
| 31 | Kecamatan Gabek                                                     | 25    | 22    | 47    |
| 32 | Kecamatan Bukit Intan                                               | 39    | 17    | 56    |
| 33 | Kecamatan Girimaya                                                  | 23    | 12    | 35    |
|    |                                                                     | 1.132 | 1.861 | 2.993 |

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkalpinang 2020

## 1.5 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan Pembangunan Kota Pangkalpinang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir. Di bawah ini diuraikan ragam permasalahan Kota Pangkalpinang yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

## **1. Permasalahan dalam Pelayanan Dasar**

### **a) Bidang Pendidikan**

- 1) Masih adanya fasilitas pendidikan yang kondisinya tidak baik, baik kerusakan berat maupun ringan.
- 2) Masih ditemukannya kasus anak tidak melanjutkan sekolah karena putus di masa studi, hal ini dilihat dari masih adanya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar.
- 3) Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4.

### **b) Bidang Kesehatan**

- 1) Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan bayi dan balita.
- 2) Masih tingginya balita dengan stunting dan kecenderungan meningkatnya gizi lebih.
- 3) Kurangnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.
- 4) Masih tingginya penyakit menular TBC, kasus penderita HIV/AIDS kecenderungan meningkatnya penyakit tidak

menular (antara lain Diabetes Mellitus (DM) dan persentase hipertensi sebanyak ).

- 5) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hal ini dapat dilihat dari rumah tangga ber PHBS, dan rumah sehat. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- 6) Masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Hal ini dapat dilihat dari cakupan Desa ODF masih kurang.

**c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak.
- 2) Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak.
- 3) Jumlah penduduk setiap tahun meningkat sehingga rasio terhadap kebutuhan jalan menjadi makin kecil.
- 4) Belum adanya solusi terhadap penyediaan RTH Perkuburan Umum bagi masyarakat.

**d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Penanganan pemukiman kumuh belum optimal (*Universal Accses*).
2. Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak.
3. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH).
4. Belum semua wilayah permukiman memiliki PSU (Prasarana Sarana Utilitas).

**e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

1. Belum optimalnya kinerja penyelesaian pelanggaran K3.
2. Terbatasnya kuantitas polisi pamong praja untuk melaksanakan kegiatan penegakan Perda.
3. Tingginya kasus kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang.

**f) Sosial**

1. Masih banyaknya PMKS di Kota Pangkalpinang.
2. Belum maksimalnya penanganan PMKS.
3. Belum optimalnya bantuan sosial yang diberikan kepada para penyandang cacat.

**2. Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

**a) Tenaga Kerja**

1. Tingkat pengangguran.
2. Tingginya kasus konflik industrial yang terjadi di Kota Pangkalpinang.
3. Masih minimnya anggaran untuk pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan.

**b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan responsive gender sebagai bentuk implementasi PUG di daerah.
2. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang ada di Kota Pangkalpinang.
3. Menurunnya persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan.
4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

**c) Pangan**

1. Menurunnya kemampuan penguatan cadangan pangan.
2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.
3. Belum optimalnya penganekaragaman pangan masyarakat Kota Pangkalpinang.

**d) Pertanian**

1. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah di masyarakat karena tumpul batas dan tumpang tindih hak kepemilikan.
2. Masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
3. Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat.

**e) Lingkungan Hidup**

1. Masih minimnya pengusaha yang memahami ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan administrasi dan teknis pendirian usaha dan/atau kegiatan dalam kaitannya untuk pencegahan pencemaran air maupun udara.
2. Tingginya aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Cakupan jumlah TPS 3R yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
5. Belum adanya kelompok yang dapat mengelola TPS 3R.
6. Tingginya volume sampah yang menyebabkan TPA di Kota Pangkalpinang tidak dapat lagi menampung sampah dari masyarakat.
7. Masih minimnya SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan dampak lingkungan.
8. Tidak adanya kegiatan yang dapat mendukung peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan.

**f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP.
2. Belum optimalnya pelayanan pengurusan KTP.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.
4. Masih minimnya penduduk yang mengurus akta kematian.

**g) Pemberdayaan Masyarakat**

1. Tingkat prestasi LPM di Kota Pangkalpinang yang masih tergolong rendah.
2. Minimnya persentase jumlah kelompok binaan LPM.
3. Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai angka yang optimal.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

**h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* (persentase peserta KB belum maksimal, cakupan KB Pria masih rendah, penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah).
2. Belum tersusunnya kebijakan dan pemetaan pertumbuhan penduduk serta pengembangan keluarga.
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL dan BKR).

**i) Perhubungan**

1. Masih adanya kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang dalam kondisi rusak.
2. Masih ada jaringan jalan yang belum terlayani angkutan umum.

3. Menurunnya jumlah angkutan umum, dikarenakan perkembangan angkutan online seperti Grab.
4. Masih ada ruas jalan yang belum dilengkapi lampu penerangan jalan.

**j) Komunikasi dan Informatika**

1. Belum terdapatnya media atau sarana pendistribusian informasi untuk mendukung pelaksanaan diseminasi yang dikelola sendiri oleh pemerintah.
2. Hanya beberapa OPD yang aktif dan memiliki website di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan website di masing-masing OPD.
4. Aplikasi pengaduan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah pusat (lapor.id) masih belum dapat beroperasi secara optimal.

**k) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

1. Semakin menurunnya jumlah koperasi di Kota Pangkalpinang.
2. Masih ditemukan koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat.
3. Masih rendahnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang masuk dalam kategori sehat

**l) Penanaman Modal**

1. Masih rendahnya promosi investasi di Kota Pangkalpinang.
2. Belum optimalnya kerjasama penanaman modal.

**m) Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
2. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga.
3. Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kompetisi, hal ini terlihat rendahnya kepesertaan pemuda dalam kegiatan-kegiatan kompetensi.

**n) Statistik**

Ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat. Hal tersebut menjadikan kesulitan dalam mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

**o) Persandian**

Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal.

**p) Kebudayaan**

1. Minimnya gelaran festival seni dan budaya yang diselenggarakan.
2. Minimnya jumlah misi kesenian.

**q) Perpustakaan**

1. Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
2. Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya tenaga ahli dan terampil (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai).
4. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang.

**r) Kearsipan.**

1. Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.
2. Masih kurangnya pengelolaan arsip in-aktif yang masih dikelola.
3. Ketersediaan SDM arsiparis yang masih sangat terbatas.
4. Kurang luasnya cakupan sarana dan prasarana arsip terpelihara.

**3. Permasalahan Urusan Pilihan dan Penunjang Daerah**

**a) Kelautan dan Perikanan**

1. Menurunnya produksi perikanan tangkap.

2. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. (Pembinaan terhadap kelompok nelayan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan)

**b) Pariwisata**

1. Terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan.
2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, potensi wisata belum banyak yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.
3. Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

**c) Pertanian**

1. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan.
2. Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

**d) Perdagangan**

1. Menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB.
2. Belum semua pasar memenuhi syarat, terdapat 10% dari total pasar yang ada belum memenuhi syarat.

**e) Perindustrian**

1. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri.
2. Belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM, terlihat dari jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku industri kecil

**f) Penelitian dan pengembangan**

Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**g) Perencanaan Pembangunan Daerah**

Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**h) Keuangan Daerah**

Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota pangkalpinang.

**i) Kepegawaian dan Diklat**

1. Belum optimalnya penyimpanan arsip digital pegawai, dikarenakan belum lengkapnya data pegawai yang masuk dari ASN.
2. Masih rendahnya rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi.
3. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat (struktural dan managerial) peningkatan kompetensi.

**j) Sekretariat Dewan**

1. Belum optimalnya ranperda yang disiapkan OPD sehingga memperlambat pembahasan;
2. Belum semua agenda terjadwal secara resmi dalam pembahasan Bamus;
3. Beberapa penyelenggaraan rapat-rapat dewan belum tepat waktu;
4. Belum pernah dilakukan penilaian pelayanan setwan terhadap DPRD.

**k) Pengawasan**

1. Respon OPD terhadap Rekomendasi BPK kurang Optimal.
2. Perubahan ketentuan untuk evaluasi, sehingga menyulitkan melakukan penyesuaian.

3. OPD kurang kooperatif dalam merespon kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pengendalian internal.

Penetapan isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2019-2024 memperhatikan permasalahan pembangunan masing-masing urusan, isu global, isu nasional dan juga isu regional Provinsi Bangka Belitung. Rumusan isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.

1. Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar 6,93 %, berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (5,25%) dan berada dibawah Nasional (7,07%). Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah yang fluktuatif serta belum optimalnya tata kelola pasar dan sentra-sentra ekonomi baru berbasis kewilayahan.
3. Belum optimalnya pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang.
4. Belum optimalnya keberdayaan perempuan lihat dari rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 92,89 berada di atas Provinsi Bangka Belitung sebesar 89,00 dan di atas capaian Nasional sebesar 91,07. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019, Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi.
5. Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kota Pangkalpinang. Pola pikir (*mind-set*) dan

budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik namun masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. *E-government* yang ada masih harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

6. Masih adanya penduduk miskin dengan indikator Angka Kemiskinan serta belum optimalnya pengelolaan kesejahteraan sosial secara terpadu.
7. Belum optimalnya pelayanan di bidang kesehatan terutama yang berhubungan dengan fasilitas pendukung di seluruh unit pelayanan, profesionalitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, masih tingginya beberapa kasus kesehatan yang belum tertuntaskan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
8. Belum maksimalnya pemerataan kualitas pendidikan mulai dari infrastruktur pendukung, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di seluruh unit sekolah di Kota Pangkalpinang.
9. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup mulai dari kendala penanganan sampah yang dipicu oleh tinggi nya volume sampah yang mencapai 110 ton/hari, terbatasnya tempat pembuangan sampah, masih rendahnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta masih tingginya ancaman bencana banjir dan genangan.
10. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur publik khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, Penerangan jalan kota dan penuntasan penanganan kawasan kumuh.

11. Belum optimalnya infrastruktur ikonik yang mencerminkan karakteristik dan kekhasan Kota.
12. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan secara terpadu di sepanjang kawasan Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.
13. Belum adanya solusi atas krisis Lahan Perkuburan yang ada di Kota Pangkalpinang.
14. Belum optimalnya kontribusi dan akselerasi kebijakan struktur ruang Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

## **2.1 RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PANGKALPINANG 2018-2023**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang 2018-2023(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.8/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2). Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

### **2.1.1 Visi dan Misi Kota Pangkalpinang**

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi Kota Pangkalpinang, Visi dan Misi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah sesuatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita da citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pangkalpinang pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kota Pangkalpinang 2007-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”  
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Kota Pangkalpinang yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.
- 2. Pangkalpinang Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.
- 3. Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).
- 4. Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh

masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya.

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang**

| <b>Visi Jangka Menengah<br/>2018-2023</b>                                              | <b>Visi Jangka Panjang<br/>2007-2026</b>                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”</b> | Meningkatkan <u>kesejahteraan</u> rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan |

Dari persandingan di atas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang sudah selaras dengan visi jangka panjang Kota Pangkalpinang. Keselarasan tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan Visi diatas, maka Misi Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.**

Misi ini akan menjadi *paying* dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan

dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

**2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

**3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government* (*e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement*)

**4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.**

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas

pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

## **5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2023.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan.
3. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
6. Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga.
7. Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.
8. Peningkatan kualitas infrastuktur dasar di topang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran pada masing-masing tujuan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023**

| NO. | TUJUAN                                                                                                                    | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata, perdagangan dan jasa;</li> <li>2. Meningkatkan pertumbuhan investasi;</li> <li>3. Terkendalinya laju inflasi;</li> <li>4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk;</li> <li>5. menurunnya tingkat pengangguran;</li> <li>6. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat;</li> <li>7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin.</li> </ol> |
| 2.  | Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan.                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana</li> <li>9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara;</li> <li>10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.                                | 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;<br>12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).                                                                                                                                              |
| 4. | Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keteraan gender.                 | 13. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal;<br>14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;<br>15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak;<br>16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. |
| 5. | Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.                                                          | 17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga                                                         | 18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.                                            | 19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. | Peningkatan kualitas infrastuktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal. | 20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan;<br>21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni;<br>22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.                                                                                                      |

**Tabel 2.3.**  
**Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

| <b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI</b>                                                                                                                          | <b>TUJUAN</b>                                                                                                                | <b>SASARAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</b>                                                     | 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. | 1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata, perdagangan dan jasa;<br>2. Meningkatkan pertumbuhan investasi;<br>3. Terkendalinya laju inflasi;<br>4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk;<br>5. menurunnya tingkat pengangguran;<br>6. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat;<br>7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin. |
| <b>2. Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana</b> | 2. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan.                                           | 8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana<br>9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada;<br>10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba.                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju</b>                                                                    | 3. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan                                                                | 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;<br>12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Tercapainya <i>Good Governance</i></b>                                                                    | <b>daerah.</b>                                                                                       | <b>Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan</b>                             | 4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keteraan gender.                 | 13. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal;<br>14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;<br>15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak;<br>16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. |
|                                                                                                              | 5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.                                                          | 17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                              | 6. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga                                                         | 18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                              | 7. Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.                                            | 19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal</b> | 8. Peningkatan kualitas infrastuktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal. | 20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan;<br>21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni;<br>22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.                                                                                                      |

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 445/KEP/BAPPEDA-ITBANG/IX/2019 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagaimana penjelasan pada BAB I, maka gambaran strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi serta indikator kinerja utama (IKU) Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**IKU KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019-2023**

| VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI 1: Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| TUJUAN 1: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                     | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan                                                                                     | 1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor: Pariwisata, Perdagangan, Jasa. | Fomulasi Pengukuran persentase nilai produksi sektor Pariwisata, Perdagangan, dan Jasa terhadap produk Domestik Regional Bruto.                                                                                                           |
|                                                                                                                                     |                                                                       | $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_t} \times 100\%$                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                     |                                                                       | Dimana :                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                       | t+1 = tahun pengamatan PDRB<br>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya                                                                                                                                                                       |
| 2. Meningkatkan pertumbuhan investasi                                                                                               | 2. Nilai investasi                                                    | · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                       | · Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                       | · Fomulasi Pengukuran:Jumlahnilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     |                                                                       | · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Terkendalinya laju inflasi                                                                                                       | 3. Angka inflasi                                                      | · Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                       | · Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.Fomulasi Pengukuran: |
|                                                                                                                                     |                                                                       | $\left[ \{(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_t)\}^{1/t} \right] - 1$                                                                                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                       | Dimana :                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                       | $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                       | Dimana:                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     |                                                                       | Inf <sub>n</sub> = nilai inflasi pada tahun n                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                     |                                                                       | Inf <sub>(n+)</sub> = nilai pada 1 tahun berikutnya                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                                                                       | n = tahun .....                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                     |                                                                       | · Tipe Perhitungan: Non Kumulati                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                     |                                                                       | · Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang                                                                                                                                                                                   |

|                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk                | 4. Indeks gini                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomulasi Pengukuran:<br/> <math display="block">G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})</math> </li> <li>• Dimana :<br/> Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i<br/> Qi : persentase kumulatif tota pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i<br/> Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :<br/> G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah<br/> 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang<br/> G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi </li> <li>• Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul> |
| 5. menurunnya tingkat pengangguran                           | 5. TingkatPengangguran Terbuka (TPT)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Fomulasi Pengukuran: Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%.</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat              | 6. PDRB perkapita                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Fomulasi Pengukuran: PDRB dibagi Jumlah Penduduk Pertengahan tahun</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin | 7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial dibagi jumlah penduduk miskin dikali 100</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI: 'Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM' (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan</b>                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana                                                      | 8. Indeks risiko bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan indeks risikobencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks Bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C). Formulasi Pengukuran:<br/> <math display="block">R = \{H \times V \times (1-C)\}^{1/3}</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota</li> </ul> |

|                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                             | Pangkalpinang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara | 9. Persentase penegakan Perda               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemkot Pangkalpinang.</li> </ul> |
| 10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba            | 10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN Kota Pangkalpinang pada tahun bersangkutan.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemkot Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                    |

|                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TUJUAN 3: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.</b>                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan                                | 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fomulasi Pengukuran: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Opini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                    | 12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)         | 13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Fomulasi Pengukuran: Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total usur yang terisi dikali nilai penimbang.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Survey IKM terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang.</li> </ul> |
|                                                                                                    | 14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fomulasi Pengukuran: Ada/Tidak Ada penyelenggaraan pemerintahanyang memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasiuntuk memberikan layanankepada Pengguna SPBE.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | 15. Indeks Profesionalitas ASN                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</li> </ul> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p> <math>IP = W_{1j} * R_{1j}</math><br/> <math>IP_1 = W_{2k} * R_{2k}</math><br/> <math>IP_1 = W_{3l} * R_{3l}</math> </p>                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | $IP1 = W_{4m} * R_{4m}$<br><b>Keterangan:</b><br>$IP$ = Indeks Profesionalisme<br>$IP_1$ = Indeks Profesionalisme ke-i<br>$IP_1$ = Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi<br>$IP_2$ = Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi<br>$IP_3$ = Indeks Profesionalisme dimensi kinerja<br>$IP_4$ = Indeks Profesionalisme dimensi disiplin<br>$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j<br>$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k<br>$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l<br>$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m<br>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif<br>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI: 'Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM'(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MISI 4: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan</b>                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TUJUAN 4: 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Meningkatkan kualitas pendidikan                                                                    | 16. Rata-rata lama sekolah (RLS)                          | · Formulasi Pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.<br>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif<br>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                         | 17. Harapan lama sekolah                                  | · Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.<br>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif<br>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. |
| 14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                                           | 18. Usia Harapan Hidup                                    | · Formulasi Pengukuran: Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.<br>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif<br>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15. Meningkatkan kualitas pembangunan responsif gender dan anak                                         | 19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD   | · Formulasi Pengukuran: Jumlah anggaran yang Responsif Gender <b>dibagi</b> jumlah APBD <b>dikali</b> 100%<br>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif<br>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                         | 20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD | · Formulasi Pengukuran: Jumlah anggaran yang Responsif Hak Anak <b>dibagi</b> jumlah APBD <b>dikali</b> 100%<br>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan | 21. Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Jumlah perempuan yang menduduki posisi tenaga profesional, teknisi dan manajerial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang, Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                           | 22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Persentase perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural (<i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i>) di lingkup Pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TUJUAN 4: 2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran                                          | 23. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran:</li> </ul> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$ <p> TFR = Angka Kelahiran Total<br/> ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur<br/> bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu<br/> pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama<br/> i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok umur 45-49)<br/> K = bilangan konstanta biasanya 1000 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul> |
| TUJUAN 4: 3. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga                                            | 24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun dibagi jumlah kompetisi yang diikuti dikali 100%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TUJUAN 4: 4. Meningkatkan Upaya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah                               | 25. Persentase seni budaya yang dilestarikan                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi Total Benda, situs &amp; kawasan yang dimiliki daerah x 100%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Pemerintah Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**VISI: 'Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM' (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

**MISI 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal**

**TUJUAN 5: Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.**

|                                                                    |                                         |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan | 26. Persentase jalan dalam kondisi baik | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kota dikali 100%</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perhubungan                                |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | 27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah sarana dan prasarana perhubungan kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana perhubungan eksisting dikali 100</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | 21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni | 28. Luasan Areal Kawasan Kumuh <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Luas kawasan <b>dibagi</b> Luas wilayah <b>dikali</b> 100%</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | 29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi <b>dibagi</b> jumlah rumah tinggal <b>dikali</b> 100%</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | 30. Rasio rumah layak huni                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah layak huni <b>dibagi</b> jumlah penduduk</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah sampah yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah timbulan sampah <b>dikali</b> 100%</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | 32. Indeks kualitas air                                                  | Formulasi Pengukuran:<br>$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $\text{Rumus metode IP :}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ <p><b>Hasil:</b><br/> <math>0 \leq PI_j \leq 1,0</math>; baik (memenuhi baku mutu)<br/> <math>1,0 \leq PI_j \leq 5,0</math>; cemaran ringan<br/> <math>5,0 \leq PI_j \leq 10,0</math>; cemaran sedang<br/> <math>PI_j \geq 10,0</math>; cemaran berat</p> <p><b>Keterangan:</b><br/> <math>PI_j</math> : indeks pencemaran bagi peruntukan j,<br/> <math>C_i</math> : konsentrasi parameter kualitas air i,<br/> <math>L_{ij}</math> : konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul> |
|                                            | 33. Indeks kualitas udara                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran:<br/> <math>IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]</math></li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi, dan kinerja aparatur ; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah pada bulan Maret 2020.

**Tabel 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020**

| <b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>                                         |                                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MISI 1: Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</b>                                               |                                                                                      |                         |
| TUJUAN 1: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan. |                                                                                      |                         |
| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET                  |
| 1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan                                                                                     | 1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor:<br>▪ Pariwisata,<br>▪ Perdagangan,<br>▪ Jasa. | 3,40%<br>4,90%<br>5,70% |
| 2. Meningkatkan pertumbuhan investasi                                                                                               | 2. Nilai investasi                                                                   | 35 Milyar Rupiah        |
| 3. Terkendalinya laju inflasi                                                                                                       | 3. Angka inflasi                                                                     | 5%                      |
| 4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk                                                                                       | 4. Indeks gini                                                                       | 0,250%                  |
| 5. menurunnya tingkat pengangguran                                                                                                  | 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                                | 5%                      |
| 6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat                                                                                     | 6. PDRB perkapita                                                                    | 60,22 Juta              |
| 7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin                                                                        | 7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial                   |                         |

|                                                                                                                                           |                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>VISI: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>                                                |                                             |               |
| <b>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana</b> |                                             |               |
| <b>TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan</b>                                           |                                             |               |
| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                                                                                                  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                    | <b>TARGET</b> |
| 8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana                                                      | 8. Indeks risiko bencana                    | 112           |
| 9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara                                                                                       | 9. Persentase penegakan Perda               | 97%           |
| 10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba                                                                                                  | 10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba | 170 kasus     |

|                                                                                                           |                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VISI: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>                |                                                                  |               |
| <b>MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i></b> |                                                                  |               |
| <b>TUJUAN 3: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.</b>                       |                                                                  |               |
| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                                                                  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                         | <b>TARGET</b> |
| 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan                                       | 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP) | BB            |
|                                                                                                           | 12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah        | WTP           |
| 12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)                | 13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 82            |
|                                                                                                           | 14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)        | 2,90          |
|                                                                                                           | 15. Indeks Profesionalitas ASN                                   | 77,20         |

|                                                                                                         |                                                                                                                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VISI: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>              |                                                                                                                        |               |
| <b>MISI 4: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan</b>                   |                                                                                                                        |               |
| <b>TUJUAN 4: 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.</b> |                                                                                                                        |               |
| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                                                                | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                                                               | <b>TARGET</b> |
| 13. Meningkatnya kualitas pendidikan                                                                    | 16. Rata-rata lama sekolah (RLS)                                                                                       | 9,91 Tahun    |
|                                                                                                         | 17. Harapan lama sekolah                                                                                               | 12,93 Tahun   |
| 14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                                           | 18. Usia Harapan Hidup                                                                                                 | 72,72 Tahun   |
| 15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak                                         | 19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD                                                                | 8,20%         |
|                                                                                                         | 20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD                                                              | 0,60%         |
| 16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan               | 21. Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )                             | 37.500 orang  |
|                                                                                                         | 22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda. | 39,50%        |
| <b>TUJUAN 4: 2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.</b>                                            |                                                                                                                        |               |
| 17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran                                                        | 23. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)                                                                                  | 2,10%         |
| <b>TUJUAN 4: 3. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga</b>                                           |                                                                                                                        |               |

|                                                                    |                                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga                     | 24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti | 92,00% |
| TUJUAN 4: 4. Meningkatkan Upaya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah |                                                                                          |        |
| 19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah        | 25. Persentase seni budaya yang dilestarikan                                             | 100%   |

|                                                                                                                   |                                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VISI: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>                        |                                                                        |               |
| <b>MISI 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal</b> |                                                                        |               |
| TUJUAN 5: Peningkatan kualitas infratsruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.      |                                                                        |               |
| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                                                                                          | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                               | <b>TARGET</b> |
| 20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan                                    | 26. Persentase jalan dalam kondisi baik                                | 56,50%        |
|                                                                                                                   | 27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik     | 91,00%        |
| 21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni                                          | 28. Luasan Areal Kawasan Kumuh                                         | 10,00 ha      |
|                                                                                                                   | 29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi                         | 96,50%        |
| 22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                                        | 30. Rasio rumah layak huni                                             | 90,50%        |
|                                                                                                                   | 31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani | 83,00%        |
|                                                                                                                   | 32. Indeks kualitas air                                                | 70,70%        |
|                                                                                                                   | 33. Indeks kualitas udara                                              | 97,10%        |

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Konsep dasar dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2018- 2023.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Atau

$$\frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama atas sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode Warna |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | 91% ≤ 100%                       | Sangat tinggi                        |            |
| 2  | 76 % ≤ 90%                       | Tinggi                               |            |
| 3  | 66 % ≤ 75%                       | Sedang                               |            |
| 4  | 51 % ≤ 65%                       | Rendah                               |            |
| 5  | ≤ 50 %                           | Sangat Rendah                        |            |

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*).

- **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020**

Tujuan pembangunan Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Pangkalpinang telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah. Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan yang meliputi: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut. Sehingga gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan

hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pangkalpinang tahun 2020.

**Tabel 3.1-1**  
**Pencapaian IKU Kota Pangkalpinang Tahun 2020**

| Sasaran Strategis                                                                          | Indikator Kinerja                                                                    | Realisasi 2019         | Capaian 2020            |                                     |                            | Target Akhir RPJMD      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                            |                                                                                      |                        | Target                  | Realisasi                           | % Realisasi                |                         |
| 1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan                                           | 1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor:<br>▪ Pariwisata,<br>▪ Perdagangan,<br>▪ Jasa. | NA<br>2,63%<br>38,01%  | 3,40%<br>4,90%<br>5,70% | NA<br>-6,28%<br>-30,1%              | NA<br>-128,16%<br>-528,07% | 4,20%<br>5,20%<br>6,70% |
| 2. Meningkatnya pertumbuhan investasi                                                      | 2. Nilai investasi                                                                   | 368.638.115.106 rupiah | 35 Milyar Rupiah        | 2.041.393.876.256 rupiah            | 5.832,55%                  | 50 Milyar Rupiah        |
| 3. Terkendalinya laju inflasi                                                              | 3. Angka Inflasi                                                                     | 2,31%                  | 5%                      | 0,44%                               | 191%                       | 5%                      |
| 4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk                                              | 4. Indeks gini                                                                       | NA                     | 0,250%                  | 0,271%                              | 91,6%                      | 0,235%                  |
| 5. menurunnya tingkat pengangguran                                                         | 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                                | 5,01%                  | 5%                      | 6,93%                               | 61,40%                     | 4,85%                   |
| 6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat                                            | 6. PDRB perkapita                                                                    | 64,42 juta             | 60,22 Juta              | 62,08 juta                          | 103,09%                    | 60,61 Juta              |
| 7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin                               | 7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan social                   | 52,71%                 | 39,75%                  | 100%                                | 251,57%                    | 45,50%                  |
| 8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana       | 8. Indeks risiko bencana                                                             | 84,28%                 | 112                     | 120,4                               | 92,50%                     | 103                     |
| 9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara                                        | 9. Persentase penegakan Perda                                                        | 96%                    | 97%                     | 100%                                | 103,09%                    | 100%                    |
| 10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba                                                   | 10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba                                          | 45 kasus               | 170 kasus               | 5 kasus                             | 197,06%                    | 100 kasus               |
| 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan                        | 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)                     | B                      | BB                      | Dalam proses penilaian              | -                          | A                       |
|                                                                                            | 12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                            | WTP                    | WTP                     | Sedang dalam proses pemeriksaan BPK | -                          | WTP                     |
| 12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | 13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | 83,14                  | 82,00                   | NA                                  | NA                         | 90                      |
|                                                                                            | 14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                            | NA                     | 2,90                    | NA                                  | NA                         | 3,80                    |

|                                                                                           |                                                                                                                        |              |              |              |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|                                                                                           | 15. Indeks Profesionalitas ASN                                                                                         | 63,46        | 77,20        | 53,00        | 68,65%  | 78,40        |
| 15. Meningkatnya kualitas pendidikan                                                      | 16. Rata-rata lama sekolah (RLS)                                                                                       | 9,80 tahun   | 9,91 Tahun   | 9,92 tahun   | 100,10% | 10,00 Tahun  |
|                                                                                           | 17. Harapan lama sekolah                                                                                               | 12,99 tahun  | 12,93 Tahun  | 13,15 tahun  | 101,70% | 13,02 Tahun  |
| 16. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                             | 18. Usia Harapan Hidup                                                                                                 | 73,17 tahun  | 72,72 Tahun  | 73,30 tahun  | 100,18% | 72,78 Tahun  |
| 17. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak                           | 19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD                                                                | 5,62%        | 8,20%        | 0,82%        | 10%     | 8,50%        |
|                                                                                           | 20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD                                                              | 0,34%        | 0,60%        | 0,18%        | 30%     | 1,50%        |
| 18. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan | 21. Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )                             | 38.052 orang | 37.500 orang | 37.649 orang | 100,40% | 39.000 orang |
|                                                                                           | 22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda. | 41,29%       | 39,50%       | 42,77%       | 108,28% | 42,50%       |
| 19. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran                                          | 23. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)                                                                                  | 2,35%        | 2,10%        | 2%           | 104,76% | 1,65%        |
| 20. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga                                            | 24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti                               | 68,75%       | 92,00%       | 119,05%      | 129,40% | 95%          |
| 21. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah                               | 25. Persentase seni budaya yang dilestarikan                                                                           | 100%         | 100%         | 100%         | 100%    | 100%         |
| 20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan            | 26. Persentase jalan dalam kondisi baik                                                                                | 90,86%       | 56,50%       | 91,68%       | 126,26% | 60,00%       |
|                                                                                           | 27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik                                                     | 72,23%       | 91,00%       | 79,13%       | 86,95%  | 97,00%       |
| 21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni                  | 28. Luasan Areal Kawasan Kumuh                                                                                         | 21,90 ha     | 10,00 ha     | 24,3 ha      | 243%    | 0            |
|                                                                                           | 29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi                                                                         | 97,06%       | 96,50%       | 97,05%       | 100,57% | 99,50%       |
|                                                                                           | 30. Rasio rumah layak huni                                                                                             | 86,00%       | 90,50%       | 95,65%       | 105,69% | 93,50%       |
| 22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                | 31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani                                                 | 97,51%       | 83,00%       | 92,48%       | 142,28% | 86,00%       |
|                                                                                           | 32. Indeks kualitas air                                                                                                | 0%           | 70,70%       | 56,67%       | 80%     | 73,70%       |
|                                                                                           | 33. Indeks kualitas udara                                                                                              | 91,22%       | 96,20%       | 88,36%       | 92%     | 97,10%       |

Adapun pencapaian indikator sasaran kinerja untuk masing-masing misi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah:

**Tabel 3.1-2**  
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Kinerja

| No.                                    | Kategori       | Jumlah Indikator Kinerja | Persentase |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| <b>Misi I (7 Indikator Kinerja)</b>    |                |                          |            |
| 1                                      | Sangat tinggi  | 5                        | 71,42%     |
| 2                                      | Tinggi         | 1                        | 14,29%     |
| 3                                      | Sedang         | -                        | -          |
| 4                                      | Rendah         | -                        | -          |
| 5                                      | Sangat rendah  | 1                        | 14,29%     |
| 6                                      | Tidak ada data | -                        | -          |
| <b>Misi II (3 Indikator Kinerja)</b>   |                |                          |            |
| 1                                      | Sangat tinggi  | 3                        | 100%       |
| 2                                      | Tinggi         | -                        | -          |
| 3                                      | Sedang         | -                        | -          |
| 4                                      | Rendah         | -                        | -          |
| 5                                      | Sangat rendah  | -                        | -          |
| 6                                      | Tidak ada data | -                        | -          |
| <b>Misi III (5 Indikator Kinerja)</b>  |                |                          |            |
| 1                                      | Sangat tinggi  | -                        | -          |
| 2                                      | Tinggi         | -                        | -          |
| 3                                      | Sedang         | 1                        | 20%        |
| 4                                      | Rendah         | -                        | -          |
| 5                                      | Sangat rendah  | -                        | -          |
| 6                                      | Tidak ada data | 4                        | 80%        |
| <b>Misi IV ( 10 Indikator Kinerja)</b> |                |                          |            |
| 1                                      | Sangat tinggi  | 8                        | 80%        |
| 2                                      | Tinggi         | -                        | -          |
| 3                                      | Sedang         | -                        | -          |

|                                      |                |   |       |
|--------------------------------------|----------------|---|-------|
| 4                                    | Rendah         | - | -     |
| 5                                    | Sangat rendah  | 2 | 20%   |
| 6                                    | Tidak ada data | - | -     |
| <b>Misi IV (8 Indikator Kinerja)</b> |                |   |       |
| 1                                    | Sangat tinggi  | 5 | 62,5% |
| 2                                    | Tinggi         | 3 | 37,5% |
| 3                                    | Sedang         | - | -     |
| 4                                    | Rendah         | - | -     |
| 5                                    | Sangat rendah  | - | -     |
| 6                                    | Tidak ada data | - | -     |

**Tabel 3.1-3**

Persentase capaian indikator

| Capaian        | Jumlah Indikator | Persentase |
|----------------|------------------|------------|
| Sangat tinggi  | 21               | 63,63%     |
| Tinggi         | 4                | 12,12%     |
| Sedang         | 1                | 3,03%      |
| Rendah         | -                | 0%         |
| Sangat rendah  | 3                | 9,09%      |
| Tidak ada data | 4                | 12,13%     |
| Jumlah         | 33               | 100%       |

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkanantara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan. Pengukuran akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada Lampiran II. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1**  
**Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata,**  
**perdagangan dan jasa**

**Tabel 3.2-1**

Capaian sasaran Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata,  
perdagangan dan jasa

| Indikator                            | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|--------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                      |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Persentase pertumbuhan PDRB sektor : |        |            |           |                                |            |           |                                |
| • Pariwisata                         | %      | 51,5       | NA        | NA                             | 3,4        | NA        | NA                             |
| • Perdagangan                        | %      | 4,50       | 2,63      | 58,44                          | 4,90       | -6,28     | -128,16                        |
| • Jasa                               | %      | 5,30       | 38,01     | 717,16                         | 5,70       | -30,1     | -528,07                        |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b>     |        |            |           |                                |            |           |                                |

Berikut analisa capaian indikator pada sasaran ini :

**1. Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata, perdagangan dan jasa**

**a. Penjelasan**

Manfaat penyusunan PDRB antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran.

PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2020 ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran dan industri pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 26,04 persen dan 12,77 persen. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kota Pangkalpinang. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkalpinang.

**b. Analisis Kinerja**

Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,02 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan

usaha perekonomian sehingga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor perdagangan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -6,28%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019 maka terjadi penurunan. Demikian juga realisasi sektor jasa terjadi kontraksi yang cukup signifikan ditahun 2019 yaitu dengan capaian sebesar minus (-30,1 %) yang meliputi jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Sedangkan untuk PDRB sektor pariwisata tidak tersedia data karena sub-sub sektor pariwisata sudah menjadi bagian dari sektor yang lain seperti subsektor layanan travel sudah masuk dalam sektor transportasi, perhotelan masuk dalam sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, souvenir/cinderamata masuk dalam sektor perdagangan sehingga format pertumbuhan PDRB yang dirilis BPS tidak lagi menjadikan lapangan usaha sektor pariwisata sebagai sektor tersendiri.

Penyebab ketidakberhasilan pencapaian target pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa antara lain disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat

**Tabel 3.2-2**

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha

| Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>                                              |                                                                                                                                            | 2017        | 2018 <sup>r</sup> | 2019 <sup>*</sup> | 2020 <sup>***</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (1)                                                                          |                                                                                                                                            | (2)         | (3)               | (4)               | (5)                 |
| A                                                                            | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>                                                             | -5          | 8,83              | 3,22              | 5,68                |
| B                                                                            | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>                                                                                   | -           | -                 | -                 | -                   |
| C                                                                            | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>                                                                                                  | 3,47        | -3,45             | -10,74            | -4,52               |
| D                                                                            | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>                                                                                      | 4,88        | 6,46              | 31,21             | 0,92                |
| E                                                                            | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>     | 7,61        | -5,45             | 2,03              | 5,60                |
| F                                                                            | Konstruksi/ <i>Construction</i>                                                                                                            | 6,71        | 6,34              | 10,09             | -1,46               |
| G                                                                            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 6,62        | 4,78              | 2,61              | -6,28               |
| H                                                                            | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>                                                                            | 8,54        | 7,28              | 4,80              | -9,32               |
| I                                                                            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>                                                     | 6,3         | 4,33              | 12,54             | -4,75               |
| J                                                                            | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>                                                                             | 9,11        | 14,89             | 17,58             | 18,38               |
| K                                                                            | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>                                                                      | 2,59        | 9,96              | 5,26              | -6,72               |
| L                                                                            | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>                                                                                                  | 4,7         | 9,41              | 2,16              | 4,10                |
| M,N                                                                          | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>                                                                                                | 2,08        | 6,94              | 2,20              | -17,70              |
| O                                                                            | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>      | 4,98        | 9,88              | 9,90              | -6,77               |
| P                                                                            | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>                                                                                                          | 4,57        | 9,50              | 8,71              | -0,90               |
| Q                                                                            | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>                                                         | 8,08        | 4,65              | 10,76             | 1,16                |
| R,S,T,U                                                                      | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>                                                                                             | 9,46        | 8,09              | 11,03             | -5,94               |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i></b> |                                                                                                                                            | <b>5,19</b> | <b>5,08</b>       | <b>3,29</b>       | <b>-3,02</b>        |

Catatan/Note: r) angka revisi/*revision figures*\*) angka sementara/*preliminary figures*\*\*) angka sangat sementara/*very preliminary figures*

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other source

**c. Solusi**

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam

menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu juga Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19.

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pertumbuhan investasi

**Tabel 3.2-3**

Capaian Sasaran Nilai Investasi

| Indikator         | Satuan | Tahun 2019 |                 |                                | Tahun 2020 |                   |                                |
|-------------------|--------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
|                   |        | Target     | Realisasi       | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi         | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| • Nilai Investasi | Rp     | 30 M       | 368.638.115.109 | 1.229%                         | 35 M       | 2.041.393.876.256 | 5.832,55%                      |

Berikut analisa capaian indikator pada sasaran ini :

#### **1. Nilai Investasi**

##### **a. Penjelasan**

Nilai investasi Kota Pangkalpinang bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM secara online dengan menggunakan hak akses yang telah diberikan BKPM melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id>. Untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan, dan untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan perusahaan yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang. Pemantuan perusahaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi investasi. Untuk itu Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang fokus pada pemantauan dan pembinaan adalah agar pelaku usaha tertib dalam menyampaikan LKPM. Selain melakukan pemantuan juga dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada perusahaan yang belum mendaftarkan kegiatan usaha melalui OSS atau yang sudah tetapi mengalami kendala sehingga belum mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

Perhitungan persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dengan target dikali 100 persen, dalam pengertian semakin tinggi angka realisasi dibandingkan angka target maka semakin baik nilai kinerjanya.

- Capaian kinerja tahun 2020 di hitung sebagai berikut :  $\text{Rp } 2.041.393.876.256,- / \text{Rp } 35.000.000.000 \times 100\% = 5.832,55\%$

#### **b. Analisis Kinerja**

Investasi yang ada di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu variabel yang penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Pangkalpinang dapat tumbuh dan berkembang :

1. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.
2. Pendapatan per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik untuk berinvestasi.

3. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi seperti : jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.
4. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.
5. Kualitas sumber daya manusia juga merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, karena teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.
6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mendukung antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.
7. Stabilitas politik dan keamanan juga penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

Dibandingkan dengan tahun 2019 Terjadi penurunan dengan target kinerja di tahun 2020 sebesar 153,4 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 215.219.481.196 milyar rupiah. Angka tersebut melebihi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020. Namun demikian

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2019. Nilai investasi pada tahun 2020 berasal dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan jumlah persetujuan ijin investasi sebanyak 164 izin.

### **c. Solusi**

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menambah nilai investasi diantaranya adalah peran serta Pemerintah Daerah diantaranya :

1. Menyediakan Peta Potensi Investasi sebagai informasi kepada para pelaku ekonomi di daerah atau pun di luar daerah, kapan, dimana dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang akan dikembangkan.
2. Mendorong para investor yang telah mendapatkan izin investasinya agar segera merealisasikan rencana investasi mereka serta melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanam Modal (LKPM) melalui kegiatan pengawas dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
3. Agar Pemerintah Daerah dapat menjadikan LKPM sebagai syarat perusahaan untuk membuat izin-izin lainnya (untuk pengembangan usahanya) dikarenakan penyampaian LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-4**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Nilai Investasi

| No | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD s/d Tahun 2021 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Nilai Investasi   | Rp     | 6.612.943.051.633                  | 50.000.000.000                                    | 13.225 %                       |

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa capaian realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2020 indikator ini jika dibandingkan dengan rencana target akhir periode RPJMD yaitu tahun 2023 adalah sebesar 13.225%. Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya untuk mencapai target nilai investasi tahunan ini dengan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program peningkatan pelayanan perizinan
2. Program peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan serta penanganan pengaduan perizinan
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
5. Program pengembangan dan pembinaan embaga ekonomi dan keuangan
6. Program peningkatan pengembangan BUMD, perencanaan, pengkajian, pembinaan, monitoring dan evaluasi
7. Program kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3 Terkendalnya Laju Inflasi

**Tabel 3.2-5**

Capaian sasaran Angka Inflasi

| Indikator     | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|---------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|               |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Angka Inflasi | %      | 5,5        | 2,31      | 158                            | 5          | 0,44      | 191                            |

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, dengan capaian kinerja di tahun 2020 sebesar 0,44%. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian analisis capaian kinerja indikator ini:

#### **Angka Inflasi**

##### **a. Penjelasan**

Kebijakan Perekonomian yang difasilitasi berupa perhitungan Indeks Harga Konsumen dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang. Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan akan berdampak positif kepala kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

## b. Analisis Kinerja

Dari tabel di atas terlihat realisasi laju inflasi Kota Pangkalpinang di tahun 2020 adalah sebesar 0,44 persen dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 191 persen. Hasil yang diperoleh di tahun 2020 ini menunjukkan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 5 persen.

**Tabel 3.2-6**

Angka Inflasi

| Bulan dan Tahun | Inflasi Bulanan dan Tahunan Pangkalpinang (Persen) |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------|-------|
|                 | 2019                                               | 2020  | 2021  |
| Januari         | 0,93                                               | 1,09  | 1,17  |
| Februari        | -0,48                                              | -0,68 | -0,33 |
| Maret           | -0,76                                              | -0,07 | -     |
| April           | 0,74                                               | -0,92 | -     |
| Mei             | 1,78                                               | 0,51  | -     |
| Juni            | 0,99                                               | 0,20  | -     |
| Juli            | -0,41                                              | 0,06  | -     |
| Agustus         | -0,10                                              | -0,61 | -     |
| September       | 0,09                                               | 0,05  | -     |
| Oktober         | -0,02                                              | -0,32 | -     |
| November        | -0,82                                              | 0,51  | -     |
| Desember        | 0,38                                               | 0,71  | -     |
| Tahunan         | 2,31                                               | 0,44  | 0,83  |

### c. Solusi

Tahun 2020 Penurunan Laju Inflasi Kota Pangkalpinang diupayakan dengan berbagai kegiatan dalam menjaga kestabilan harga yang menjadi kelompok keluaran inflasi. Upaya kegiatan dalam menjaga kestabilan harga dalam mensejahterakan masyarakat Kota Pangkalpinang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis pada Tahun 2020 seperti bantuan sosial, bazar pertanian, operasi pasar murah dan bantuan sembako. Upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya inflasi.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-7**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD  
Tahun 2023 Sasaran Angka Inflasi

| No | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Angka Inflasi     | %      | 0,44                               | 5                                             | 191                            |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laju inflasi di Kota Pangkalpinang dapat terus ditekan. Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mengupayakan penekanan laju inflasi dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4 Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk

**Tabel 3.2-8**

Capaian sasaran Indeks Gini

| Indikator   | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|-------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|             |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Indeks Gini | %      | 0,255      | NA        | NA                             | 0,250      | 0,271     | 91,6                           |

### a. Penjelasan

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang atau tidak sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa.

### b. Analisis Peningkatan Kinerja

Data indeks gini rasio hanya diukur sampai ke tingkat provinsi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengukur capaian kinerja pada sasaran ini menggunakan *gini ratio* provinsi.

Bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,257. Angka ini menurun 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,262.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa **provinsi dengan ketimpangan terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,271.**

**Tabel 3.2-9**

Indeks Gini

|  <b>BADAN PUSAT STATISTIK</b> |                       |                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| Provinsi                                                                                                       | Gini Rasio            |                           |         |
|                                                                                                                | Perkotaan             |                           |         |
|                                                                                                                | 2020                  |                           |         |
|                                                                                                                | Semester 1<br>(Maret) | Semester 2<br>(September) | Tahunan |
| KEP. BANGKA BELITUNG                                                                                           | 0.276                 | 0.271                     | -       |

### c. Solusi

Tahun 2020 Penurunan indeks gini Kota Pangkalpinang diupayakan dengan berbagai kegiatan dalam memperkecil ketimpangan pendapatan ditengah masyarakat. Upaya kegiatan dalam hal pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis pada Tahun 2020 dengan program pemberdayaan sosial.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-10**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD  
Tahun 2023 Sasaran Indeks Gini

| No | Indikator Sasaran | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Indeks Gini       | indeks | 0,271                              | 0,235                                         | 90,64                          |

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya tingkat pengangguran

**Tabel 3.2-11**

Capaian sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

| Indikator                    | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                              |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 5,05       | 5,01      | 99,21                          | 5          | 6,93      | 61,40                          |

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

### **Tingkat pengangguran terbuka**

#### **a. Penjelasan**

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2020 sebanyak 161.793 orang (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2020). Sebesar 62,37 penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar 62,37 persen artinya sebesar 62 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkalpinang di tahun yang sama adalah sebesar 6,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 69 orang diantaranya pencari kerja.

#### b. Analisis Kinerja

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan menjadi 6,93% pada Tahun 2020 dari target sebesar 5%, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 61,40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019, terjadi kenaikan sebesar 1,92%.

Penyebab utama dari kondisi tersebut adaah pandemi Covid-19, dimana sebanyak 195 pekerja dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 11.600 orang yang dirumahkan. Dari 439 perusahaan yang terdata di Kota Pangkalpinang, hampir 90% terdampak Covid-19

**Tabel 3.2-12**

Capaian sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

|  <b>BADAN PUSAT STATISTIK<br/>PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b> |                              |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|
| Wilayah Babel                                                                                                                                           | Tingkat Pengangguran Terbuka |      |      |
|                                                                                                                                                         | 2018                         | 2019 | 2020 |
| Kepulauan Bangka Belitung                                                                                                                               | 3,65                         | 3,62 | 5,25 |
| Bangka                                                                                                                                                  | 4,12                         | 3,80 | 5,42 |
| Belitung                                                                                                                                                | 2,93                         | 2,90 | 4,82 |
| Bangka Barat                                                                                                                                            | 3,11                         | 2,85 | 4,12 |
| Bangka Tengah                                                                                                                                           | 3,93                         | 4,39 | 5,59 |
| Bangka Selatan                                                                                                                                          | 4,35                         | 3,87 | 5,42 |
| Belitung Timur                                                                                                                                          | 1,50                         | 1,71 | 3,93 |
| Kota Pangkalpinang                                                                                                                                      | 4,70                         | 5,01 | 6,93 |

### c. Solusi

Kendati banyak karyawan yang di PHK dan dirumahkan sepanjang tahun 2020, tetapi disisi lain angka penempatan lowongan kerja di tahun 2020 cukup tinggi. Bahkan ada sekitar 620 tenaga kerja yang terserap. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang berinvestasi di sektor perdagangan di Kota Pangkalpinang. Banyaknya tenaga kerja yang terserap tersebut tidak terlepas dari peran Walikota yang telah menjadikan Pangkalpinang diirik oleh perusahaan untuk berinvestasi.

Jumlah tersebut belum dihitung dengan retail-retail yang kecil. Jumlah penempatan lowongan kerja di tahun 2020 merupakan jumlah tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi ini dengan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3. Program peningkatan kesempatan kerja
4. Program pengembangan hubungan industrial dan jamsostek

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{4,85 - (6,93 - 4,85)}{4,85} \times 100\% = 57,11 \%$$

**Tabel 3.2-13**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka

| No | Indikator Sasaran            | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 6,93                               | 4,85                                          | 57,11                          |

Berdasarkan table diatas, bisa dijelaskan bahwa:

Realisasi akumulasi Akumulasi Tingkat Pengangguran Terbuka [APT] Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Tahun 2018-2023 sebesar 57,11%. Mengingat periode akhir RPJMD yang semakin dekat maka perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan peran serta semua pihak dalam melakukan upaya tersebut.

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pendapatan Perkapita

**Tabel 3.2-14**

Capaian sasaran Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

| Indikator      | Satuan      | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|----------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                |             | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| PDRB Perkapita | Juta Rupiah | 59,92      | 64,42     | 107,51                         | 60,22      | 62,08     | 103,09                         |

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

#### **PDRB Perkapita**

##### **a. Penjelasan**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

#### b. Analisa

Realisasi capaian pendapatan perkapita tahun 2020 sebesar Rp 62,08 juta dari target Rp 60,22 juta. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya sebesar 103,09% dalam kategori baik sekali. Terjadi peningkatan sebesar 4,42% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp 64,42 juta. Capaian ini sudah melewati target yang diharapkan pada akhir RPJMD yang ditargetkan sebesar Rp 60,61 juta.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain : tambahan investasi pada masing-masing lapangan usaha yang berdampak pada peningkatan capaian PDRB pada setiap sektor, baik investasi pemerintah maupun swasta; sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku ekonomi; adanya peningkatan daya saing serta promosi-promosi unggulan daerah yang telah dilaksanakan.

**Tabel 3.2-15**

Pendapatan Perkapita

| <b>Tabel 13.2.5</b>                            | <b>Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2016–2020</b> |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kabupaten/Kota<br/>Regency/Municipality</b> | <b>2016</b>                                                                                                               | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     |
| (1)                                            | (2)                                                                                                                       | (3)             | (4)             | (5)             | (6)             |
| Bangka                                         | 37 048,7                                                                                                                  | 39 493,5        | 40 238,4        | 40 821,2        | 40 556,9        |
| Belitung                                       | 44 768,0                                                                                                                  | 47 911,4        | 50 036,9        | 51 926,0        | 50 847,4        |
| Bangka Barat                                   | 61 038,4                                                                                                                  | 64 564,7        | 66 108,0        | 66 378,8        | 61 617,2        |
| Bangka Tengah                                  | 40 434,2                                                                                                                  | 42 269,8        | 42 682,3        | 43 668,6        | 42 241,2        |
| Bangka Selatan                                 | 38 152,1                                                                                                                  | 40 465,3        | 41 074,3        | 41 267,2        | 40 636,4        |
| Belitung Timur                                 | 54 145,7                                                                                                                  | 57 404,1        | 58 284,5        | 59 566,2        | 59 487,7        |
| Pangkalpinang                                  | 55 492,0                                                                                                                  | 59 241,9        | 62 129,8        | 64 184,7        | 62 075,5        |
| <b>Jumlah/Total</b>                            | <b>46 192,1</b>                                                                                                           | <b>49 038,2</b> | <b>50 329,2</b> | <b>51 304,2</b> | <b>49 841,1</b> |

### c. Solusi

Memperkuat kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup serta dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam menciptakan dukungan secara fisik, non fisik maupun dari SDM yang akan digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya yang nantinya akan menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan lapangan pekerjaan.

**Tabel 3.2-16**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat

| No | Indikator Sasaran | Satuan      | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | PDRB Perkapita    | Juta Rupiah | 62,08                              | 60,61                                         | 102,43                         |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi akumulasi angka PDRB per kapita di Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2021 telah melebihi target akhir kinerja RPJMD, yakni sebesar 102,43% dari target.

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Penduduk Miskin

**Tabel 3.2-17**

Capaian sasaran Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penduduk miskin

| Indikator                                                       | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                 |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial | %      | 37,50      | 52,71     | 140,56                         | 39,75      | 100       | 251,57,88                      |

### **a. Penjelasan**

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan penyaluran sumber daya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya sedangkan asuransi sosial adalah bentuk jaminan sosial dengan pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Gagasan perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka.

Perlindungan sosial erat kaitannya dengan mendapatkan pekerjaan layak untuk penghidupan dan untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan. Perlindungan sosial ini tidak dapat bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan secara efektif

strateginya harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro-pekerjaan.

## **b. Analisis Kinerja**

Target perlindungan sosial terhadap penduduk miskin tahun 2020 sebesar 39,75% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 251,57% dengan kategori Sangat Baik.

Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 45,50%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2020 adalah 100 %, dengan demikian capaian kinerja tahun 2020 melampaui target akhir RPJMD sebesar 219,78%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah banyaknya bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah covid-19. Selain menjalankan program dan kegiatan rutin seperti: perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); peningkatan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peran dan fungsi teknis bidang sosial bagi PMKS penerima manfaat; peningkatan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin dan rentan untuk mendapatkan bantuan dan penanganan; serta pemberdayaan sosial bagi PMKS.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang diketahui bahwa total penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebanyak 10.566 KK. Sementara jumlah bantuan yang disalurkan adalah sebanyak 21.205 paket bantuan. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat. Berikut rincian bantuan yang disalurkan selama tahun 2020 :

**Tabel 3.2-17**

Jumlah Bantuan yang disalurkan selama tahun 2020

| No | Jenis Bantuan                  | APBN         | APBD Provinsi | APBD Kota   |
|----|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1  | Program sembako/ e-warung/ PKH | 7.693 paket  | -             | -           |
| 2  | Bantuan sosial tunai covid-19  | 7.116 paket  | 2.100 paket   | 4.296 paket |
|    | <b>Total</b>                   | 14.809 paket | 2.100 paket   | 4.296 paket |

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- program perlindungan dan jaminan sosial; program rehabilitasi sosial;
- program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- program penanganan fakir miskin;
- program pemberdayaan sosial.

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 8**  
Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

**Tabel 3.2-18**

Capaian sasaran Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

| Indikator             | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|-----------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                       |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Indeks resiko bencana | %      | 115        | 84,28     | 73,28                          | 112        | 120,4     | 92,50                          |

**a. Penjelasan**

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu.

Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak dapat tertangani.

Pemanduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan kajian risiko bencana.

Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan bahwa kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

#### **b. Analisis Kinerja**

Bersumber dari data sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Pangkalpinang terdapat 5 jenis bencana yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Pada Tahun 2020 untuk telah terjadi bencana banjir, kebakaran hutan dan angin puting beliung.

Indeks Risiko Bencana pada tahun 2020 adalah 120,4 dari target 112 sehingga capaian target adalah 92,5. Angka tersebut didapat dari penghitungan yang dilakukan secara mandiri oleh BPBD Kota Pangkalpinang.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-19**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

| No | Indikator Sasaran     | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Indeks Risiko Bencana | Nilai  | 120,4                              | 103                                           | 83,11                          |

Berikut kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Pengembangan sistem pemulihan bencana

### **c. Solusi**

#### **Tahap Pencegahan dan Mitigasi**

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability)

terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.

Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana
2. pembuatan alarm bencana
3. membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu
4. memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

### **Tahap Kesiapsiagaan**

Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut.

Pada tahap ini terdapat proses Renkon yang merupakan singkatan dari Rencana Kontinjensi. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontinjensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain:

menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil.

menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang.

melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi.

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9**  
**Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada**

**Tabel 3.2-20**

Capaian sasaran Meningkatkan cakupan penegakan perda dan perkada

| Indikator                  | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                            |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Persentase penegakan perda | %      | 96         | 96        | 100                            | 97         | 100       | 103,09                         |

**a. Penjelasan**

Kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai merupakan cita-cita seluruh umat manusia secara universal. Untuk itu diperlukan perangkat aturan (norma dan hukum) dan peran pemerintah dalam menciptakan dan memfasilitasi kondisi ketertiban dan keamanan di masyarakat. Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar PERDA. Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA adalah adanya penurunan pelanggar PERDA, hal ini antara lain disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
- Penurunan pelanggar PERDA juga tidak dapat dilepas dari gencarnya sosialisasi PERDA, khususnya PERDA bersanksi;

Peningkatan operasi non yustisi yaitu dengan gencarnya melakukan operasi penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) secara berkelanjutan dapat menurunkan pelanggaran peraturan yang berlaku, namun terdapat kendala ketika untuk memproses pelanggaran peraturan daerah

secara Yustisi atau proses hukum lewat pengadilan, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang sampai saat ini baru ada 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

#### **b. Analisis Kinerja**

Persentase penegakan PERDA pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target 97% sehingga capaian target adalah 103,09%. Angka tersebut didapat dari pembagian antara jumlah perda yang diselesaikan dengan jumlah perda yang dilaporkan dikali 100%.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-21**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara

| No | Indikator Sasaran          | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|----------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Persentase penegakan perda | %      | 100                                | 100                                                  | 100                            |

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menekan angka penyalahgunaan narkoba

**Tabel 3.2-22**

Capaian sasaran Menekan angka penyalahgunaan narkoba

| Indikator                               | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                         |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba | kasus  | 190        | 45        | 176,31                         | 170        | 5         | 197,06                         |

### **a. Penjelasan**

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan raga dan mental seseorang. Secara medis orang yang ketergantungan terhadap narkoba, akan mengalami penurunan fungsi organ penting, kesadaran sistem syaraf dan daya ingat serta penurunan kualitas dan fungsi berfikir. Secara psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi paranoid dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan normas masyarakat serta dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal.

Kondisi tersebut jika diabaikan akan terakumulasi dan pada akhirnya akan menjadi sebuah parasit di dalam masyarakat. Jika sudah meluas maka hat tersebut akan menjadi ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban serta tatanan norma dalam sebuah masyarakat. Oeh karena itu diperlukan sebuah penanganan yang menyeluruh dan mendasar dalam rangka untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pangkalpinang.

## **b. Analisis Kinerja**

Data realisasi kinerja ini diperoleh dari akumulasi data dari Badan Kesbangpol dan BNK Pangkalpinang. Pada tahun 2020, kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pangkalpinang terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni sebanyak 5 kasus. Persentase realisasi capaian kinerja sebesar 197,06%. Keberhasilan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari kerjasama yang intensif antara Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesbangpol dengan Badan Narkotika Kota Pangkalpinang yang secara intensif menyediakan fasilitasi berupa anggaran dan aparatur untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020, dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam bentuk sosialisasi penyalahgunaan narkoba bekerja sama dengan BNN Kota Pangkalpinang. Di samping itu didukung juga dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang P4GN dan atau tes urine di beberapa perangkat daerah.

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan target kinerja dalam rangka mewujudkan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat diantaranya keterbatasan anggaran, rotasi aparatur yang belum diselaraskan dengan kompetensi yang relevan dan sumbatan komunikasi antara stakeholder di dalam menyelesaikan permasalahan trantibum.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-23**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Menekan angka penyalahgunaan narkoba

| No | Indikator Sasaran                       | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-----------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba | kasus  | 5                                  | 100                                           | 195                            |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini sudah melebihi target RPJMD tahun 2023, yaitu 195%.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

**Tabel 3.2-24**

Capaian sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

| Indikator                                             | Satuan   | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |                          |                                |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                       |          | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi                | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Nilai AKIP                                            | kategori | BB         | B         | 70                             | BB         | Dalam proses penilaian   | A                              |
| Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Daerah | Kategori | WTP        | WTP       | 100                            | WTP        | Dalam proses pemeriksaan | WTP                            |

**a. Penjelasan Indikator Nilai AKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan

pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 445/KEP/BAPPEDA-LITBANG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang ini merupakan hasil revisi yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN RB. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

#### **b. Analisis Kinerja**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB) memberikan nilai 60,72 atau predikat “B”(Baik) dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2019. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2018 dengan perolehan nilai 61,73 atau predikat “B” perolehan nilainya mengalami penurunan sebesar 1,01 point. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Dengan perolehan nilai B (baik) ini pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi setelah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 60,72 atau predikat **B** (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang sudah menggunakan manajemen kinerja, dan perlu perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Komponen yang dinilai                | Bobot      | Nilai 2018   | Nilai 2019   |
|-----|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| a.  | Perencanaan Kinerja                  | 30         | 20.94        | 20.57        |
| b.  | Pengukuran Kinerja                   | 25         | 15.69        | 13.64        |
| c.  | Pelaporan Kinerja                    | 15         | 8.72         | 10.03        |
| d.  | Evaluasi Internal                    | 10         | 5.29         | 5.28         |
| e.  | Capaian Kinerja                      | 20         | 11.09        | 11.20        |
|     | <b>Nilai hasil evaluasi</b>          | <b>100</b> | <b>61.73</b> | <b>60.72</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |            | <b>B</b>     | <b>B</b>     |

Penjelasan atas hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum melaksanakan hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan masih rendahnya komitmen pimpinan bersama para kepala perangkat daerah dalam memperbaiki manajemen kinerja.
2. Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh perangkat daerah, namun mengalami penurunan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu :
  - tujuan belum sepenuhnya menetapkan hal-hal strategis;
  - terdapat redundansi sasaran, dan sasaran terlalu banyak;
  - sasaran RENSTRA masih sangat sederhana dan belum menetapkan hal-hal strategis;
  - target kinerja belum ditetapkan secara baik.

3. Perjanjian kinerja telah disusun, namun masih belum sesuai dengan RENSTRA dan belum menetapkan hal-hal strategis serta menyajikan indikator kinerja utama.
4. Pengukuran kinerja pada level Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan belum dilakukan pengukuran secara berjenjang menggunakan teknologi informasi serta belum dilakukan penyusunan indikator kinerja individu.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memenuhi indikator yang baik (SMART) dan masih sama dengan indikator RENSTRA dan Perjanjian Kinerja. Mutu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah kurang baik karena kelemahan dari RENSTRA serta belum cukup mengukur hal-hal strategis.
6. Laporan Kinerja sebagian perangkat daerah belum menyajikan informasi pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan informasi keuangan serta besaran efisiensi.
7. Belum tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja terintegrasi pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
8. Inspektorat baru melakukan evaluasi SAKIP terhadap 5 (lima) perangkat daerah dan belum melakukan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam meningkatnya manajemen kinerja, direkomendasikan kepada Walikota Pangkalpinang untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya 2018 dan meningkatkan komitmen pimpinan bersama para kepala perangkat daerah dalam peningkatan kinerja.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan memperbaiki tujuan, sasaran beserta indikator dan target kinerja.

3. Menginstruksikan kepala perangkat daerah agar memperbaiki perjanjian kinerja yang telah disusun, menetapkan hal-hal strategis yang menyajikan indikator kinerja utama.
4. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar melakukan pengukuran secara berjenjang menggunakan teknologi informasi serta menginstruksikan seluruh pegawai agar menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai indikator kinerja individu.
5. Meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah menjadi indikator yang baik (SMART) yang dapat mengukur hal-hal strategis.
6. Menginstruksi seluruh kepala perangkat daerah agar penyusun laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan informasi keuangan serta besaran efisiensi.
7. Melakukan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang.
8. Memerintahkan Inspektur Kota Pangkalpinang agar melakukan evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta meningkatkan kompetensi evaluator.

Beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun 2018 yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Membangun komitmen dan keterlibatan kepala OPD dalam penerapan manajemen kinerja;
2. Pengintegrasian perencanaan terkait prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD;
3. Perjanjian kinerja sudah dilaksanakan secara berjenjang sampai level kepala seksi (belum sampai level individu);
4. Perubahan indikator kinerja dan penyelarasan dalam pemilihan program dan kegiatan dilakukan bersamaan dengan perubahan renstra OPD yang akan digunakan dalam perencanaan untuk pelaksanaan tahun anggaran 2021;

5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dilaksanakan di tahun 2020 untuk perencanaan tahun 2021 melalui sitem e-planing “Senyum Pandu”.

### c. Solusi

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi LAKIP tersebut, tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa hal strategis dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP pemerintah Kota Pangkalpinang dimasa yang akan datang. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023 dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.
2. Merumuskan kembali tujuan dan sasaran beserta indikatornya sampai pada tingkatan program kegiatan perangkat daerah
3. Melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan cara road show ke Perangkat Daerah untuk memastikan keterlibatan dan komitmen pimpinan Kepala Perangkat Daerah.
4. Melakukan asistensi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja perangkat Daerah.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-25**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

| No | Indikator Sasaran | Satuan   | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Nilai AKIP        | kategori | B                                  | A                                             | 66,67                          |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah Kota Pangkalpinang. Persentase capaian kinerja tersebut didapat dari pembagian nilai realisasi dengan nilai batas bawah kategori A, dikali 100%.

#### **a. Penjelasan Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Sedangkan tanggungjawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih

mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilain risiko salah yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019.

Sedangkan Opini hasil pemeriksaan dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 belum bisa diperoleh, karena proses penyusunan LKPD Tahun 2020 dilakukan pada tahun kinerja berikutnya (Tahun 2021). Saat ini masih tahapan pengumpulan data pendukung dari seluruh OPD dan Rekonsiliasi realisasi keuangan seluruh OPD.

#### **b. Analisis Kinerja**

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalam dibuat oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN**

**Tabel 3.2-26**

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas ASN

| Indikator                                  | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                            |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat | Nilai  | 81,50      | 83,14     | 102,01                         | 82,00      | NA        | NA                             |

|                            |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks SPBE                | Nilai | 2,50  | NA    | NA    | 2,90  | NA    | NA    |
| Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | 76,80 | 63,46 | 82,63 | 77,20 | 53,00 | 68,65 |

## **Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

### **Penjelasan**

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **Analisis Kinerja**

Pada tahun 2020 kegiatan survei kepuasan masyarakat ditiadakan. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 dimana kota pangkalpinang

ditetapkan sebagai zona merah bahkan diakhir tahun 2020 meningkat menjadi zona hitam. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :

- Survei masih dilakukan secara manual melalui pengisian kuesioner dan wawancara secara langsung.
- Keterbatasan anggaran, sehingga anggaran kegiatan survei dialihkan untuk kegiatan penanggulangan covid-19.
- Tingkat ketakutan masyarakat dalam menghadapi covid-19

## **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

### **Penjelasan**

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa kita sebut *E-Government* bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan terintegtrasi ke dalam suatu sistem serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*).

Dasar hukum dari penilaian indeks SPBE ini Peraturan Menpan RB No 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE dan Perpres No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang kita kenal dengan SPBE.

### **Analisis Kinerja**

Dari sumber data portal SPBE <https://spbe.go.id>, di Kementerian Kominfo menyatakan bahwa untuk Kota Pangkalpinang dan beberapa daerah lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung datanya belum ada. Hal ini berarti untuk indikator ini dinyatakan belum (tidak berhasil), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai supervisor kegiatan pada saat itu tergolong baru. Sedangkan aspek yang dinilai itu seperti aspek kebijakan tata kelola, aspek kebijakan layanan SPBE, aspek

kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan, aspek teknologi informasi dan komunikasi, aspek administrasi dan pemerintahan dan aspek layanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab kegiatan sedang melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan di setiap domain dan aspek yang dinilai seperti kebijakan internal definitif, adanya Tim Pengarah SPBE, Rencana Induk SPBE, Kebijakan Integrasi Data dan Integrasi aplikasi pemerintah. Kebijakan yang definitif dapat meningkatkan nilai indek SPBE Kota Pangkalpinang menjadi baik. Untuk mencapai nilai Indeks SPBE yang ditargetkan 2,50 atau kategori BAIK, diperlukan adanya kolaborasi antar Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan nilai tersebut, selain itu pula penyediaan kebijakan internal yang definitif, dan dokumentasi atau bukti terkait pemenuhan nilai indikator menjadi prioritas utama untuk semua Perangkat Daerah.

## **Indeks Profesionalitas ASN**

### **Penjelasan**

Pada tahun 2020, target kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah dengan nilai 77.20 akan tetapi hanya bisa terealisasi dengan nilai 53.00 dengan tingkat realisasi 68.65%. Hal ini dikarenakan dokumen pendukung untuk penilaian riwayat pengembangan kompetensi masih kurang. Padahal penilaian kompetensi memiliki bobot penilaian paling besar dibandingkan dengan variabel lain yakni 40%.

Untuk penilaian kompetensi, variabel yang diukur antara lain Diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya. Diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diukur disini adalah yang diikuti atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Selain itu diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diikuti harus mempunyai bukti otentik yakni disertai dengan bukti fotocopy sertifikat yang dilampirkan dalam dokumen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan untuk lingkup kota, kegiatan seminar/workshop/bimtek/ dan

sejenisnya jarang disertai dengan pembagian sertifikat diakhir kegiatan. Padahal hal tersebut dapat mendukung dalam penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya kualitas pendidikan

**Tabel 3.2-27**

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan

| Indikator              | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                        |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Rata-rata lama sekolah | Tahun  | 9,89       | 9,80      | 99,09                          | 9,91       | 9,92      | 100,10                         |
| Harapan lama sekolah   | Tahun  | 12,90      | 12,99     | 100,79                         | 12,93      | 13,15     | 101,70                         |

#### **1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

##### **a. Penjelasan**

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sedang di jalankan. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan

standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per kapita.

#### **b. Analisis Kinerja**

Sasaran strategis ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Rata-rata lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pembangunan pendidikan untuk melihat seberapa lama waktu yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Realisasi atas capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dapat dilihat pada tabel diatas.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi :

- a. partisipasi sekolah;
- b. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki;

- c. ijazah tertinggi yang dimiliki;
- d. tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
- e.

**Tabel 3.2-28**

Rata-Rata Lama Sekolah

| Wilayah Babel             | Rata-Rata Lama Sekolah<br>(Tahun) |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------|------|------|
|                           | 2020                              | 2019 | 2018 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 8,06                              | 7,98 | 7,84 |
| Bangka                    | 8,24                              | 8,23 | 8,20 |
| Belitung                  | 8,46                              | 8,41 | 8,15 |
| Bangka Barat              | 7,22                              | 7,21 | 7,18 |
| Bangka Tengah             | 7,19                              | 7,13 | 6,80 |
| Bangka Selatan            | 6,67                              | 6,42 | 6,36 |
| Belitung Timur            | 8,22                              | 8,15 | 8,14 |
| Kota Pangkalpinang        | 9,92                              | 9,80 | 9,78 |

### c. Solusi

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Persentase realisasi capaian kinerja di tahun 20 sebesar 100,10 % lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target nasional angka rata-rata lama sekolah kota Pangkalpinang sudah melampaui 9 tahun, artinya Kota Pangkalpinang berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-29**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan

| No | Indikator Sasaran      | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | rata-rata lama sekolah | Tahun  | 9,92                               | 10                                            | 99,2                           |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 mencapai 9,92 tahun dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu selama 10 tahun atau baru mencapai 99,2%. Untuk mencapai target RPJMD, Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan program :

1. Program penyediaan akses dan peningkatan mutu ayanan paud, PNF dan Dikdas
2. Program peningkatan akses dan mutu layanan paud dan pendidikan non formal
3. Program peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar
4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
5. Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan
6. Program peningkatan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal
7. Program pengelolaan bantuan operasional sekolah.

## **2. Harapan Lama Sekolah**

### **a. Penjelasan**

Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

## b. Analisis Kinerja

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 13,15 tahun. Persentase realisasi capaian kinerja adalah 101,70% dari target kinerja 12,93 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan 0,91 tahun.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-30**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan

| No | Indikator Sasaran      | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | rata-rata lama sekolah | Tahun  | 13,15                              | 13,02                                         | 100,99                         |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian target pada tahun 2020 telah melampaui target akhir pada RPJMD. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota pangkalpinang telah berhasil dalam melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan. Adapun program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang awbagai berikut :

1. Program penyediaan akses dan peningkatan mutu ayanan paud, PNF dan Dikdas.
2. Program peningkatan akses dan mutu layanan paud dan pendidikan non formal.
3. Program peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar.
4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan.
6. Program peningkatan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal.

7. Program pengelolaan bantuan operasional sekolah.

**Tabel 3.2-31**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan

| Wilayah       | Harapan Lama Sekolah<br>(Tahun) |       |       |
|---------------|---------------------------------|-------|-------|
|               | 2018                            | 2019  | 2020  |
| Pangkalpinang | 12,83                           | 12,99 | 13,15 |

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 14  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

**Tabel 3.2-32**

Capaian sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

| Indikator          | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|--------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                    |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Usia Harapan Hidup | Tahun  | 72,70      | 73,17     | 100,65                         | 73,17      | 73,30     | 100,18                         |

## Usia Harapan Hidup

### a. Penjelasan

Usia harapan hidup (UHH) adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang berbeda penilaiannya per wilayah tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Banyak faktor yang

mempengaruhi Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pangkalpinang antara lain : sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Angka ini didefinisikan sebagai perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan *age specific rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya **angka jumlah kematian bayi**. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

#### **b. Analisis Kinerja**

Angka Usia Harapan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 mencapai angka 73,30 tahun, angka ini lebih tinggi dari rata-rata AHH nasional (Indonesia) yang pada periode tersebut mencapai 71,47 tahun. Sementara itu, rata-rata angka harapan hidup di Kota Pangkalpinang tumbuh sebesar 0,13% (Persen)/ tahun selama periode tersebut.

Jika dilihat dari aspek kesehatan, peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh peningkatan kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan erat dengan angka kematian bayi, pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi di Kota Pangkalpinang 9 kasus/1000 kelahiran hidup atau di *Angka 2,1*. Angka ini masih dibawah angka nasional yakni 24/1.000 kelahiran hidup.

Pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan pembinaan tentang kesehatan Ibu dan anak, mengoptimalkan program kelas ibu hamil dan meningkatkan kerjasama antara bidan dengan dokter spesialis dalam penanganan kesehatan bayi sebagai upaya menekan angka

kematian bayi yang masih terjadi di Kota Pangkalpinang. Kegiatan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi seluruh penduduk dari berbagai kriteria umur sampai usia lanjut berupa kegiatan di dalam gedung puskesmas maupun luar gedung puskesmas.

**Tabel 3.2-33**  
Angka Harapan Hidup

| Wilayah Babel             | Angka Harapan Hidup |       |       |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|
|                           | 2020                | 2019  | 2018  |
| Kepulauan Bangka Belitung | 70,64               | 70,50 | 70,18 |
| Bangka                    | 71,06               | 70,99 | 70,73 |
| Belitung                  | 71,05               | 70,94 | 70,64 |
| Bangka Barat              | 70,06               | 69,99 | 69,73 |
| Bangka Tengah             | 71,36               | 71,16 | 70,78 |
| Bangka Selatan            | 68,16               | 67,90 | 67,47 |
| Belitung Timur            | 72,03               | 71,90 | 71,59 |
| Kota Pangkalpinang        | 73,30               | 73,17 | 72,86 |

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-34**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

| No | Indikator Sasaran  | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|--------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Usia Harapan Hidup | Tahun  | 73,30                              | 72,78                                         | 100,71                         |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Usia Harapan Hidup tahun 2020 adalah 73,30 tahun selisih 1,83 tahun lebih tinggi dari angka Nasional yaitu 71,47 tahun. Meskipun demikian, untuk lebih meningkatkan usia harapan hidup, di Kota Pangkalpinang, Pemerintah Daerah menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan
2. Program upaya kesehatan masyarakat
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Program perbaikan gizi masyarakat
5. Program pengembangan lingkungan sehat
6. Program pencegahan dan penanguanggann penyakit menular
7. Program standarisasi pelayanan kesehatan

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 15**  
**Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak**

**Tabel 3.2-35**

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas pembangunan resposif gender dan anak

| Indikator                                       | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                                 |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Rasio anggaran responsif gender terhadap APBD   | %      | 8,10       | 5,62      | 69,38                          | 8,20       | 0,82      | 10                             |
| Rasio anggaran responsif hak anak terhadap APBD | %      | 0,30       | 0,34      | 113,33                         | 0,60       | 0,18      | 30                             |

## **Rasio Anggaran Responsif Gender terhadap APBD**

### **a. Penjelasan**

Alokasi anggaran menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah, kemudian dari alokasi anggaran juga dapat diketahui seberapa besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Asumsi bahwa anggaran diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, pasti di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali menjadi alasan pembenaran pemerintah untuk tidak memberikan perhatian khusus untuk kelompok-kelompok miskin dan minoritas. Padahal meskipun alokasi anggaran itu diberikan kepada semua orang, namun belum tentu dinikmati dengan kapasitas yang setara dan berdampak yang sama bagi semua orang. Faktanya, dampak yang dirasakan perempuan dan laki-laki dari kebijakan anggaran berbeda, umumnya pihak perempuan dirugikan dengan kebijakan anggaran yang netral. Oleh sebab itu, alasan utama diperlukannya anggaran responsif gender dimaksudkan untuk memujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

### **b. Analisis**

Target tahun 2020 sebesar 8,20% dan terealisasi sebesar 0,82% sehingga capaian kinerjanya adalah 10% dengan kategori kurang. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi kinerja tahun ini tercapai 9,65% dari kondisi akhir RPJMD ditargetkan Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 8,50%. Pencapaian indikator ini didukung oleh Bappeda dan Litbang, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan sehingga kinerja dan fokus sasaran urusan pemerintahan menjadi lebih optimal. Belum berhasilnya dalam mencapai target kinerja antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19
2. sarana dan prasarana yang ada kurang cukup untuk mendukung tercapainya target kinerja organisasi;
3. anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Pangkalpinang dan dianggap belum ideal untuk pencapaian target kinerja;

### c. Solusi

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan rasio anggaran ini sebagai berikut :

1. Memperkuat kembali komitmen daerah dan perangkat daerah dalam hal upaya responsif anak.
2. Melakukan konsolidasi, sinergi dan kolaborasi antar stake holder yang terlibat dalam hal ini.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-36**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Responsif Gender dan Anak

| No | Indikator Sasaran                             | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Rasio anggaran responsif gender terhadap APBD | %      | 0,82                               | 8,5                                           | 9,65                           |

### Rasio Anggaran Responsif Hak Anak terhadap APBD

#### a. Penjelasan

Pemenuhan hak dan perlindungan anak telah diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagai salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah, sehingga tanggung jawab untuk mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut juga menjadi lingkup tugas Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun, dalam pelaksanaannya kualitas berbagai layanan bagi anak, baik pendidikan, kesehatan, sarana bermain, sarana pengasuhan maupun yang lain sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah. Salah satu cara menilai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah dengan melihat kondisi anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak

#### **b. Analisis Kinerja**

Target capaian kinerja anggaran yang responsif hak atas anak tahun 2020 adalah 0,60% dan terealisasi sebesar 0,18%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 30% dengan kategori Kurang. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 0,34%, realisasi kinerja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,16%. Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 1,50%, dengan demikian masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target sebesar 1,32%.

**Tabel 3.2-37**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Responsif Gender dan Anak

| No | Indikator Sasaran                               | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Rasio Anggaran Responsif Hak Anak terhadap APBD | %      | 0,62                               | 1,5                                           | 41,33                          |

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 16**  
**Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam**  
**berbagai sektor pembangunan**

**Tabel 3.2-38**

Capaian sasaran Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan

| Indikator                                                            | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                      |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial         | orang  | 37.000     | 38.052    | 102,84                         | 37.500     | 37.649    | 100,40                         |
| Rasio perempuan yang duduk dalam jabatan struktural di lingkup pemda | %      | 38,50      | 41,29     | 107,25                         | 39,50      | 42,77     | 108,28                         |

**a. Penjelasan**

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi

korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

## **b. Analisis Kinerja**

**Target kinerja indikator jumlah perempuan sebagai profesional** pada tahun 2020 adalah sebesar 37.500 orang dan terealisasi sebesar 37.649 orang sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,40 % dengan kategori Sangat Baik. Realisasi kinerja tahun 2020 ini tercapai 37.649 orang dari kondisi akhir RPJMD ditargetkan jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (*Non Pemerintah*) sebesar 39.000 orang. Hal ini merupakan capaian yang realistis dan optimis pada akhir tahun RPJMD dapat terlaksana sesuai target, mengingat masih ada waktu 2 tahun lagi untuk merealisasikan jumlah tersebut. Ketercapaian ini juga sebagai bukti bahwa kebijakan-kebijakan yang responsif gender telah berdampak di lingkungan masyarakat dan dunia kerja.

**Indikator Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator & Pengawas) di lingkup Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang** didapat dari data sektoral Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2020 telah terealisasi sebesar 42,77 % dengan capaian kinerja sebesar 108,28%. Persentase realisasi kinerja tahun ini tercapai 39,50% dari target yang diharapkan dari kondisi akhir RPJMD ditargetkan Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (*JPT, Administrator & Pengawas*) di lingkup Pemerintah Daerah sebesar 42,50%. Berarti pada tahun ini masih kurang 0,27% dari target akhir RPJMD. Hal ini merupakan capaian yang realistis dan optimis pada akhir tahun RPJMD dapat terlaksana sesuai target, mengingat masih ada waktu 2 tahun lagi untuk merealisasikan rasio tersebut.

## Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 17 Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran

**Tabel 3.2-39**

Capaian sasaran Meningkatkan upaya penurunan angka kelahiran

| Indikator                  | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                            |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Total Fertility Rate (TFR) | %      | 2,25       | 2,35      | 104,44                         | 2,10       | 2         | 104,76                         |

### **a. Penjelasan**

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan hidup oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. TFR merupakan salah satu indikator ukuran kemajuan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dalam satu negara. Penghitungan TFR yang tepat menggunakan metode tidak langsung, salah satunya adalah Own-Method Children (metode anak kandung). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perempuan dan anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya. Sampel dalam analisis perhitungan ini adalah wanita usia subur (WUS) umur 15 hingga 49 tahun dan anak balita yang tinggal bersama orang tuanya. Anak balita dalam perhitungan ini adalah anak kandung, sedangkan anak berstatus bukan anak kandung dilibatkan dalam penghitungan guna menambah jumlah anak yang berada dalam rumah tangga ibu. Hasil perhitungan menggunakan Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa TFR di Indonesia lebih tinggi (3,2) dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan sumber data yang lain. Jika dilihat dari pola ASFR (Age Specific Fertility Rate), angka kelahiran tertinggi tercatat pada usia 20-24 kemudian usia 15-19. Implikasi pentingnya adalah fokus program keluarga berencana harus diberikan

pada kelompok umur tersebut, salah satunya adalah dengan peningkatan usia kawin pertama.

## b. Analisis Kinerja

Pengukuran *Total Fertility Rate* (TFR) bersumber dari data sektoral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Pangkalpinang. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,25%, *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2019 adalah sebesar 2,35% dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,76%. Untuk mewujudkan kondisi ideal diperlukan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program yang mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-40**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran

| No | Indikator Sasaran    | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|----------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Total Fertility Rate | %      | 2                                  | 1,65                                          | 78,79                          |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Total fertility rate tahun 2020 adalah 2 tahun, lebih tinggi dari capaian nasional dengan selisih 0,26 tahun yaitu 2,26 tahun. Meskipun demikian, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja ini, di Kota Pangkalpinang Pemerintah Daerah menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
4. Program kesehatan reproduksi remaja
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

### c. Solusi

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah ini akan semakin besardan diperkirakan akan terjadi ledakan penduduk tahun 2030, sehingga akan menjadi sebuah masalah besar apabila tidak segera ditanggulangi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang. Tingginya pertumbuhan yang terjadi karenamasih tingginyaangka Total Fertility Rate (TFR).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka TFR adalah dengan mengintensifkan program pengendalian penduduk atau lebih dikenal dengan Prgoram Keluarga Berencana.

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga

**Tabel 3.2-41**

Capaian sasaran Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

| Indikator                                                                            | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                                      |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti | %      | 91         | 68,75     | 75,55                          | 92,00      | 119,05    | 129,40                         |

#### **a. Penjelasan**

Pemberdayaan Pemuda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur atau pihak terkait.

Strategi pemberdayaan pemuda dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif pada setiap kegiatan pemuda.

Pemberdayaan Olahraga yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif. Strategi Pemberdayaan Olahraga dimaksudkan sebagai upaya terciptanya budaya berolahraga yang harus juga diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di dalam tiga kelompok jalur pembinaan olahraga, yaitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi. Masyarakat sehat, yang dicapai melalui kegiatan olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing yang tinggi dengan negara lain, yang pada akhirnya dapat menciptakan prestasi dan citra bangsa di tingkat dunia. Dengan demikian, untuk dapat menjadi masyarakat yang kokoh, aktif, produktif, unggul dan jaya akan terwujud bilamana terdapat sinkronisasi dari ketiga jalur pembinaan tersebut. Kendati dari ketiga jalur tersebut memiliki sasaran dan wadah yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang erat.

## b. Analisis Kinerja

Pemberdayaan Pemuda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga menjadi sasaran dengan indikator rasio prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti terealisasi sebesar 119,05% dengan tingkat capaian kinerja 129,40 %. Pada tahun 2020 pemuda dan atlet Kota Pangkalpinang hanya mengikuti Pekan Olahraga Daerah dan Olahraga Tradisional tingkat Provinsi. Hal tersebut dikarenakan oleh pandemi covid-19, sebagai salah satu upaya penanggulangan covid-19. Adapun peroleh medali dari cabang olahraga yang diikuti adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2-42**

Perolehan Medali Kota Pangkalpinang  
Pada tahun 2019 dan 2020

| No | Uraian   | Tahun |      | Kegiatan                                        |
|----|----------|-------|------|-------------------------------------------------|
|    |          | 2018  | 2019 |                                                 |
| 1  | Emas     | 185   | 7    | Popda dan olahraga tradisional tingkat Provinsi |
| 2  | Perak    | 179   | 10   | Popda dan olahraga tradisional tingkat Provinsi |
| 3  | Perunggu | 192   | 8    | Popda dan olahraga tradisional tingkat Provinsi |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, 2020

## c. Solusi

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan serta pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi pemuda yang

tentunya dapat mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga kegiatan dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan melalui inventarisasi data organisasi kepemudaan update tahunan, monitoring dan legalitas organisasi kepemudaan.

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah

**Sasaran Strategis 19** : Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.

| Indikator                                | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                          |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Persentase seni budaya yang dilestarikan | %      | 100        | 100       | 100                            | 100        | 100       | 100                            |

#### **Persentase seni budaya yang dilestarikan**

##### **a. Penjelasan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 Ayat (22) menyebutkan, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan. Budaya benda dan tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai dan patut dijaga kelestariannya. Untuk

mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator persentase seni budaya yang dilestarikan.

Untuk mencapai target indikator tersebut, pada tahun 2020 telah diupayakan pelaksanaan program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi.

#### **b. Analisis Kinerja**

Persentase seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian target adalah 100%. Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2-43**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada

| No | Indikator Sasaran          | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Persentase penegakan perda | %      | 100                                | 100                                           | 100                            |

#### **c. Solusi**

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase benda, situs dan cagar budaya yang lestari antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi pelestarian benda cagar budaya untuk menjaga benda cagar budaya dari ancaman kerusakan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam rangka menjaga, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
2. Mengadakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait (pemerintah pusat dan pihak swasta) dalam rangka pelestarian benda cagar budaya sehingga usaha

pelestarian dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai target indikator tersebut, pada tahun 2020 telah diupayakan pelaksanaan program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan :

1. Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi;
3. Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah.

Dengan dilaksanakannya ketiga kegiatan tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) cagar budaya Kota Pangkalpinang yang telah diregistrasi akhirnya ditetapkan di tingkat nasional. Penetapan cagar budaya yang sebelumnya diregistrasi tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan upaya pemeliharaan atas aset daerah tersebut. Adapun pada tahun 2019, cagar budaya yang telah diregistrasi dan ditetapkan tersebut di antaranya :

1. Rumah Kolonial di Jalan Menteng No. 37;
2. Gereja Kathedral Santo Yoseph;
3. Gereja GPIB Maranatha;
4. Wilhelmina Park (Tamansari);
5. Menara Air Minum di Jalan Merdeka Nomor 1;
6. Masjid Jami' di Jalan Masjid Jami';
7. Museum Timah Indonesia;
8. Wisma Timah I;
9. Rumah Sakit Bakti Timah;
10. Rumah Residen di Jalan Merdeka Nomor 1.

Selain ke 10 cagar budaya di atas, masih terdapat 72 objek lagi yang sedang melalui tahap verifikasi untuk kemudian menunggu penetapan dari kementerian terkait. Sementara itu, ragam sejarah

dan tradisi serta kesenian yang dilestarikan diantaranya seperti yang diuraikan di bawah ini :

Ragam Kesenian Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

1. Tari Sambut Pinang Sebelas;
2. Tari Campak;
3. Musik Dambus;
4. Dulmuluk;
5. Songkok Resam;
6. Tudung Saji;
7. Cual;
8. Hadrah.

Ragam Sejarah dan Tradisi Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

1. Tradisi Nganggung;
2. Telok Seroja;
3. 1 Muharram;
4. Maulid Nabi;
5. Isra Mi'raj;
6. Nuzulul Qur'an;
7. Pehcun;
8. Cengbeng;
9. Aqiqah;
10. Kong Ngian;
11. Betamat;
12. Ruahan.

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 20**  
**Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga**  
**dan perhubungan**

**Sasaran Strategis 20 :** Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan.

| Indikator                                                      | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Persentase jalan dalam kondisi baik                            | %      | 55,50      | 90,86     | 163,71                         | 56,50      | 91,68     | 126,26                         |
| Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik | %      | 89,00      | 72,23     | 81,16                          | 91         | 79,13     | 86,95                          |

## **1. Persentase jalan dalam kondisi baik**

### **a. Penjelasan**

Pemeliharaan Jalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan, yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan. Pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan merupakan pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal yang besar sehingga apabila pelaksanaannya diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat mahal untuk bisa mempertahankan *performance standard* (perbaikan ke standar kondisi yang layak). Para pengguna jalan menuntut agar jalan yang dilewatinya selalu memberi kenyamanan dan keselamatan.

Namun demikian perkerasan jalan akan mengalami penurunan kondisi seiring dengan berkurangnya umur pelayanan karena perkerasan secara terus menerus mengalami tegangan tegangan akibat beban lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan minor pada perkerasan. Selain beban lalu lintas juga terdapat pengaruh air, iklim, cuaca, kelembaban, dan lingkungan yang dapat menurunkan kondisi pelayanan jalan. Karena karakteristiknya yang selalu mengalami penurunan kondisi, maka untuk memperlambat laju kecepatan penurunan kondisi dan untuk mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak (*performance standard*), maka jalan perlu dipelihara secara terus menerus. Untuk mewujudkan pemeliharaan jalan yang hasilnya dapat memenuhi tuntutan para pengguna jalan bukanlah pekerjaan yang mudah karena diperlukan deteksi dan perbaikan sedini mungkin terhadap perkerasan guna mencegah kerusakan minor berkembang menjadi kegagalan konstruksi perkerasan. Diharapkan dengan memahami filosofi pemeliharaan jalan akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan jalan.

Agar tujuan pemeliharaan jalan dapat tercapai secara optimal diperlukan Perencanaan Pemeliharaan Jalan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan hukumnya yang antara lain adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 30 mengamanatkan bahwa penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, khususnya tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan.

Rencana penanganan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dimulai dengan penetapan ruas/segmen ruas

jalan berdasarkan kondisi jalan dengan kriteria penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, atau rekonstruksi.

## **b. Analisis Kinerja**

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Sebagai ibukota provinsi yang sedang berkembang, Kota Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan jaringan jalan dalam keadaan baik dan memadai. Indikator ini diukur melalui panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kota dikali 100%. Capaian target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel. Dari tabel diatas terlihat realisasi persentase jalan dalam kondisi baik di Tahun 2020 adalah sebesar 91,68 persen dengan pencapaian kinerja sebesar 126,26 persen. Hal ini didapat dari data panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 sepanjang kurang lebih 370 Kilometer dari panjang seluruh jalan yang ada di Kota Pangkalpinang sepanjang 403,137 Kilometer. Hasil yang diperoleh di tahun 2020 menunjukkan Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 56,50 persen. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya peningkatan realisasi indikator adalah tersedianya alokasi anggaran untuk penanganan infrastruktur di Kota Pangkalpinang.

**Tabel 3.2-44**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD  
Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana  
infrastruktur bina marga dan perhubungan

| No | Indikator Sasaran                   | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Persentase jalan dalam kondisi baik | %      | 91,68                              | 60,00                                         | 158,8                          |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2020 telah melebihi target RPJMD yakni sebesar 91,68% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 60,00% dengan capaian kinerja yakni sebesar 158,8%.

## **1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik**

### **a. Penjelasan**

Penyelenggaraan transportasi membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang baik. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk melakukan proyek pembangunan di sektor transportasi. Dalam melakukan investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, juga dilakukan kegiatan evaluasi atas usulan daerah, di mana hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian dan analisis melalui studi kecil/perorangan atau disebut juga sebagai

“Klinik Transportasi”. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui kemajuan yang telah dibuat dari manfaat pembangunan sektor transportasi jalan dan kereta api di daerah, sekaligus untuk menjadi landasan terhadap perbaikan-perbaikan yang akan diberikan lebih lanjut.

Kerjasama dan koordinasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan transportasi mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan.

#### **b. Analisis Kinerja**

Capaian kinerja pada indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel. Pada Indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan hanya tercapai 79,13% dari target 86,95% atau pencapaian sebesar 86,95%. Pada indikator ini belum tercapai dikarenakan adanya rencana penataan kota sehingga memerlukan fasilitas perhubungan yang sangat banyak.

Permasalahan : (1) kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan yang sangat banyak dalam rangka penataan kota di Kota Pangkalpinang; (2) keterbatasan anggaran. Solusi : (1) merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan secara detail dengan membuat kajian kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Pangkalpinang; (2) memilah kebutuhan yang lebih penting sehingga pada akhirnya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik tersebut dapat terpenuhi.

**Tabel 3.2-45**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD  
Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana  
infrastruktur bina marga dan perhubungan

| No | Indikator Sasaran                                              | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik | %      | 79,13                              | 97,00                                         | 81,57                          |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 79,13% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 97,00% dengan capaian kinerja yakni sebesar 81,57%.

**Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 21**  
**Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni**

**Sasaran Strategis 21 :** Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni :

| Indikator                                  | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                            |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Luasan Areal Kawasan Kumuh                 | ha     | 21,90      | 21,90     | 100                            | 10,00      | 24,3      | 243                            |
| Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi | %      | 95,50      | 97,06     | 101,63                         | 96,50      | 97,05     | 100,57                         |

|                        |   |       |    |       |       |       |        |
|------------------------|---|-------|----|-------|-------|-------|--------|
| Rasio Rumah Layak Huni | % | 89,50 | 86 | 96,09 | 90,50 | 95,65 | 105,69 |
|------------------------|---|-------|----|-------|-------|-------|--------|

## 1. Luas Area Kawasan Kumuh

### a. Penjelasan

Indikator Luas Kawasan Kumuh diketahui dengan menghitung luasan permukiman kumuh yang belum tertangani pada tahun berjalan (2019). Dalam perhitungannya, semakin kecil luasan kawasan kumuh akan semakin baik.

Referensi yang diacu dari pengurangan luas kawasan kumuh adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pada peraturan ini didefinisikan kriteria kekumuhan dapat ditinjau dari:

- ✓ Bangunan Gedung
- ✓ Jalan lingkungan
- ✓ Penyediaan Air Minum
- ✓ Drainase Lingkungan
- ✓ Pengelolaan Air Limbah
- ✓ Pengelolaan Persampahan dan
- ✓ Proteksi Kebakaran.

Untuk mengurangi kriteria kekumuhan tersebut terdapat 3(tiga) pola penanganan yaitu 1) pemugaran, 2) peremajaan dan 3) pemukiman kembali, yang direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### b. Analisis Kinerja

Target luasan areal kawasan kumuh yang ditangani/dikerjakan tahun 2020 adalah seluas 10 ha dan dapat terealisasi sebesar 24,3 ha. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 243%. Namun hal

ini bukan berarti Kota Pangkalpinang sudah bisa dinyatakan bebas dari kawasan kumuh karena masih perlu pendataan kembali untuk kemudian ditetapkan sebagai kawasan kumuh yang harus ditangani sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Setelah ada penetapan tentang wilayah kumuh dengan keputusan walikota, maka berdasarkan keputusan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target capaian tahun berikutnya.

Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah 0, sedangkan realisasi kinerja tahun 2019 adalah 100%, dengan demikian target penurunan luasan areal kawasan kumuh perkotaan tercapai.

### c. Solusi

**Tabel 3.2-46**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni

| No | Indikator Sasaran          | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|----------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Luasan Areal Kawasan Kumuh | ha     | 24,3                               | 0                                             | 243                            |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Kinerja Tahun 2020, Kota Pangkalpinang berhasil mengatasi luasan areal kawasan kumuh perkotaan. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan :

- meningkatnya fasilitasi pembangunan sarana prasarana pemukiman berbasis masyarakat;
- adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Tim Kotaku dengan masyarakat.

## **2. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi**

### **a. Penjelasan**

Secara umum, pengertian sanitasi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mewujudkan serta juga menjamin kondisi lingkungan (terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, serta udara) yang memenuhi syarat-syarat kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi peta jalan (*road map*) sanitasi nasional, peta jalan (*road map*) sanitasi provinsi dan strategi sanitasi kabupaten/kota. Regulasi terkait penyediaan sanitasi adalah Undang- Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Presiden tentang nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pembagian urusan pemerintah kabupaten untuk sub urusan persampahan adalah pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. dan Air Limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. Air limbah domestik adalah air limbah yang bersumber dari aktifitas manusia, yaitu toilet, laundry, dan dapur. Secara kuantitas, air limbah domestik jauh lebih banyak dibandingkan dengan air limbah industri. Kementerian Lingkungan Hidup telah lama mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no. 112 tahun 2003 tentang

Baku Mutu Air Limbah.

Domestik dengan 4 parameter yaitu: pH 6 – 9, BOD 100 ppm, TSS 100 ppm dan minyak & lemak 10 ppm. Sehingga perusahaan harus mengolah air limbah di Sewage Treatment Plant (STP) atau Pemerintah kabupaten/kota menyediakan pengolahan air limbah komunal. Persentase akses sanitasi ini merupakan rata-rata nilai indikator akses pelayanan air limbah rumah tangga dalam hal ini yang digunakan adalah data STBM (Dinas Kesehatan) yang dibandingkan dengan jumlah penduduk semester 2 tahun 2020 (Disdukcapil) sedangkan Indikator persentase penanganan sampah diperoleh dengan menghitung volume sampah yang ditangani dan dikelola dibandingkan jumlah volume timbunan sampah yang dihasilkan jumlah penduduk selama setahun (Dinas Lingkungan Hidup).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen guna melanjutkan keberhasilan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) 2015, khususnya sektor air minum dan sanitasi (WWS-MDG).

#### **b. Analisis Kinerja**

Realisasi rumah tinggal berakses sanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar) pada tahun 2020 sebesar 97,05% dari target 96,50%. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100,57% termasuk kategori baik sekali. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 1,06%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih, 2)

pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa di Kota Pangkalpinang yang mempunyai akses terhadap sarana sanitasi aman pada tahun 2020 sebesar 97,05%. Indikator ini dinyatakan Baik Sekali.

### c. Solusi

**Tabel 3.2-47**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni

| No | Indikator Sasaran                          | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|--------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi | %      | 97,05                              | 99,50                                         | 97,53                          |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi rumah tinggal berakses sanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar) pada tahun 2020 telah mencapai 97,05% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 99,50% dengan capaian kinerja yakni sebesar 97,53%.

Pelayanan sanitasi sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pemerintah Kota Tanjungpinang perlu terus ditingkatkan untuk tahun – tahun berikutnya dilakukan dengan mengatasi hambatan yang ada, sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya yang telah melalui berbagai kajian. Salah satu hambatan bagi pemerintah dalam membangun fasilitas infrastruktur kepada masyarakat adalah terbatasnya ketersediaan

lahan guna pembangunan sanitasi yang seharusnya berada dipusat permukiman penduduk.

### **3. Rasio Rumah Layak Huni**

#### **a. Penjelasan**

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Indikator Rasio Rumah Layak Huni diketahui dengan menghitung jumlah rumah tinggal layak huni terhadap seluruh rumah yang ada di Kabupaten Belitung timur. Dalam perhitungannya, semakin besar persentase rasio akan semakin baik.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu. Kriteria kehandalan bangunan meliputi 1) handal pada struktur bawah/pondasi, 2) handal pada struktur tengah/kolom dan balak(*beam*) dan 3) handal pada struktur atas. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. Kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12 m<sup>2</sup>/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Kriteria rumah layak huni tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.

#### **b. Analisis Kinerja**

Realisasi Rasio rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 95,65% dari target yang ditetapkan sebesar 90,50% sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 105,69%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terjadi kenaikan

sebesar 9,6%. Target kinerja di tahun 2020 telah tercapai, namun demikian masih ada waktu 3 (tiga) tahun ke depan untuk dapat menuntaskan rumah layak huni sebagaimana yang ditargetkan pada akhir RPJMD sebesar 93,50%.

**Tabel 3.2-48**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni

| No | Indikator Sasaran      | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Rasio Rumah Layak Huni | %      | 95,65                              | 93,50                                         | 102,30                         |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2020 mencapai 95,65% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 93,50% dengan capaian kinerja yakni sebesar 102,30%

### Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 22 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

**Sasaran Strategis 22** : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

| Indikator                                                          | Satuan | Tahun 2019 |           |                                | Tahun 2020 |           |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                    |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja Tahun 2020 (%) |
| Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani | %      | 82,00      | 97,51     | 118,91                         | 83         | 92,48     | 111,42                         |

|                       |   |       |       |       |       |       |    |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Indeks kualitas air   | % | 69,70 | NA    | NA    | 70,70 | 56,67 | 80 |
| Indeks kualitas udara | % | 96    | 91,22 | 95,02 | 96,20 | 88,36 | 92 |

Indikator kinerja yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yang baik adalah:

1. Timbulan sampah yang ditangani/persentase sampah yang ditangani,
2. Indeks Kualitas Air, dan
3. Indeks Kualitas Udara.

### **1. Timbulan sampah yang ditangani/persentase sampah yang ditangani**

#### **a. Penjelasan**

Kinerja Pengelolaan Sampah sangat menentukan wajah dari suatu daerah. Semakin baik kinerjanya, maka semakin bersih wilayah tersebut dan sebaliknya. Nilai penting dari kinerja pengelolaan sampah tidak hanya nilai estetika, tetapi juga meliputi manfaat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Analisis tingkat pengangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah yang berasal daerah permukiman atau non permukiman. Frekuensi pengangkutan bervariasi sesuai jumlah armada persampahan dan potensi timbulan sampah pada masing-masing wilayah.

#### **b. Analisis Kinerja**

Untuk Indikator Kinerja Timbulan Sampah yang ditangani/persentase sampah yang ditangani pada tahun 2020 realisasi sebesar **92,48%** dengan capaian sebesar **111,42%**. Tingginya capaian kinerja tahun 2020 disebabkan karena

didukung dengan fasilitas yang memadai dan meningkatnya fasilitas pendukung seperti *dump truck*, dan peran serta masyarakat (RT/RW di kelurahan) dalam rangka pengolahan sampah di lingkungan pemukiman. Serta didukung dengan fasilitas pengolahan sampah yang meningkat dan telah dilakukan pemilahan sampah yang ada di TPA yang memadai dan meningkatnya jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2020 sehingga realisasi tercapai melebihi target.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, data jumlah sampah Kota Pangkalpinang tahun 2020, sebagai berikut: perkiraan produksi sampah sebesar 180,695 ton/hari, jumlah sampah yang terangkut ke TPA adalah 167,110 ton/hari, jumlah sampah yang diantar langsung ke TPA adalah 11,540 ton/hari, jumlah sampah yang terkelola adalah 891,69 ton/hari, dan jumlah sampah yang tidak terangkut dan terkelola sebanyak 1,659 ton/hari.

### c. Solusi

**Tabel 3.2-49**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

| No | Indikator Sasaran                                                  | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani | %      | 92,48                              | 86                                            | 107,53                         |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2020 baru mencapai 92,48% dari

rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 86% dengan capaian kinerja yakni sebesar 107,53%.

Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mengupayakan peningkatan penanganan sampah melalui:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA .
2. Mengubah sampah organik menjadi sumber daya penghasil kompos, bahan bakar gas maupun minyak.
3. Penanganan sampah melibatkan personel di tingkat Kelurahan untuk pengangkutan yang disebut dengan *Satgas SMILE*.
4. Membuat program bank sampah pada beberapa titik tempat pembuangan sampah/TPS sehingga sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dengan program Bank Sampah, sampah kering dapat terpilah dengan sendirinya dan dapat didaur ulang kembali.
5. Penanganan sampah dilakukan dengan melakukan pelayanan pengangkutan sampah, melakukan pemisahan/sortasi jenis sampah dan menerapkan teknik 3R (*reduse, reuse dan recycle*).

## **2. Indeks Kualitas Air**

### **a. Penjelasan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi

oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat berkepentingan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di daerah, hal ini sebagai tindak lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **b. Analisis Kinerja**

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index/WQI*) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Untuk Indeks Kualitas Air di Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja sebesar 56,67% dengan persentase capaian kinerja sebesar 80%. Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 telah dapat diperhitungkan nilainya dibandingkan tahun 2019. Indeks Kualitas Air Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 belum bisa ditampilkan karena untuk penghitungan Indeks Kualitas Air ini memerlukan 10 parameter, sedangkan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada saat itu hanya memiliki 8 parameter. Jadi pada tahun 2019 indikator ini dinyatakan tidak berhasil.

### c. Solusi

**Tabel 3.2-50**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

| No | Indikator Sasaran   | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|---------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Indeks Kualitas Air | %      | 56,67%                             | 73,70%                                        | 76,89%                         |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 baru mencapai 56,67% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 73,70% dengan capaian kinerja yakni sebesar 76,89%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat Pangkalpinang pada umumnya.

Dari data Indeks Kualitas Air Kota Pangkalpinang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu disusun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait kualitas air permukaan di Kota Pangkalpinang;
- Melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air permukaan di Kota Pangkalpinang;
- Melakukan aksi/program kegiatan pengendalian pencemaran air limbah di Kota Pangkalpinang;

- d. Melakukan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. Pembangunan IPAL Komunal pada lokasi yang nilai fecal coli dan coliform melebihi baku mutu;
- f. Memperbaharui program dan kegiatan penghijauan atau reklamasi untuk menangani tingkat erosi dan sedimentasi secara khusus di beberapa lokasi badan air yang memiliki tingkat TSS yang tinggi;
- g. Adanya upaya peningkatan program/kegiatan penanaman pohon untuk meningkatkan presentase ruang terbuka hijau serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Pangkalpinang.

### **3. Indeks Kualitas Udara**

#### **a. Penjelasan**

Indeks Kualitas Udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pemantauan kualitas udara ambien pada umumnya mencakup nilai beberapa parameter pencemar udara seperti SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, dll. sehingga untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap arti kualitas udara ambien maka kualitas udara tersebut dapat juga diformulasikan dalam bentuk indeks kualitas udara (IKU). Di Indonesia, konsep IKU telah digunakan sejak tahun 2011 sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2011 sampai saat ini, KLHK melakukan perhitungan IKU Nasional dan IKU provinsi, dimana IKU nasional dihitung berdasar nilai IKU provinsi. Data yang digunakan untuk perhitungan IKU adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode manual passive yang dilakukan oleh KLHK bekerjasama dengan daerah.

## b. Analisis Kinerja

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Untuk Indeks Kualitas Udara Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja sebesar 88,36% dengan persentase capaian kinerja sebesar 92%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 maka terjadi penurunan 3,02%. Intervensi yang diperlukan untuk menghindari pencemaran udara adalah pengkondisian lingkungan hidup. Oleh karena itu kegagalan pencapaian target indeks kualitas udara ini karena keterbatasan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup.

## c. Solusi

**Tabel 3.2-51**

Realisasi Akumulasi Tahun 2020 dibandingkan Target Akhir RPJMD  
Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

| No | Indikator Sasaran     | Satuan | Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020 | Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2023 | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----|-----------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Indeks Kualitas Udara | %      | 88,36%                             | 97,10%                                        | 90,9%                          |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 baru mencapai 88,36% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 97,10% dengan capaian kinerja yakni sebesar 90,9%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat Pangkalpinang dalam rangka meningkatkan kualitas udara di Kota Pangkalpinang.

Dari data Indeks Kualitas Udara Kota Pangkalpinang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu disusun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Melakukan rencana aksi udara bersih setiap tahun;
- b. Menambah lokasi sampling udara agar dapat mewakili semua Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang.
- c. Pengujian emisi kendaraan bermotor dengan melihat persentase emisi gas buang yang mempunyai andil dalam menciptakan polusi udara

### **3.3 REALISASI ANGGARAN**

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (5) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan

dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 503.147.266.789 atau 87,93% dari total pagu anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp. 572.195.978.060. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 menurun sebesar 1,19% dibanding tahun sebelumnya (2019).

| No | Sasaran | Kode | URUSAN                                                        | PAGU (Rp)              | PAGU<br>REFOCUSING     | PAGU<br>PERUBAHAN      | REALISASI<br>KEUANGAN (Rp) | PERSENTASE<br>CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>KEUANGAN |              | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|    |         |      |                                                               |                        |                        |                        |                            | K                                                | Rp           |                                            |
| 1  |         |      | <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>                             | <b>274.530.887.107</b> | <b>253.234.062.040</b> | <b>321.042.817.288</b> | <b>287.563.787.048</b>     | <b>92,45</b>                                     | <b>89,57</b> |                                            |
|    |         |      | Pendidikan                                                    | 28.451.817.520         | 54.006.054.067         | 61.960.186.000         | 53.605.012.461             | 95,13                                            | 86,52        |                                            |
|    |         |      | Kesehatan                                                     | 88.417.436.617         | 96.230.812.570         | 119.259.743.439        | 107.330.187.430            | 98,42                                            | 90,00        |                                            |
|    |         |      | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             | 107.122.000.000        | 71.473.908.913         | 94.247.683.914         | 86.020.374.234             | 75,25                                            | 91,27        |                                            |
|    |         |      | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                        | 29.800.000.000         | 15.726.362.567         | 24.109.865.742         | 21.008.783.089             | 92,38                                            | 87,14        |                                            |
|    |         |      | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 17.164.768.550         | 13.362.305.825         | 17.257.183.950         | 15.884.887.210             | 98,38                                            | 92,05        |                                            |
|    |         |      | Sosial                                                        | 3.574.864.420          | 2.434.618.098          | 4.208.154.243          | 3.714.542.624              | 95,14                                            | 88,27        |                                            |
| 2  |         |      | <b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>                     | <b>74.874.783.079</b>  | <b>40.127.439.691</b>  | <b>66.009.008.938</b>  | <b>58.610.002.025</b>      | <b>92,74</b>                                     | <b>88,79</b> |                                            |
|    |         |      | Tenaga Kerja                                                  | 475.928.670            | 108.392.826            | 732.392.295            | 680.311.067                | 88,77                                            | 92,89        |                                            |
|    |         |      | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                  | 550.789.600            | 131.323.915            | 140.027.115            | 127.785.175                | 52,65                                            | 91,26        |                                            |
|    |         |      | Pangan                                                        | 327.754.000            | 119.365.000            | 176.481.644            | 92.006.644                 | 90,91                                            | 52,13        |                                            |
|    |         |      | Pertanahan                                                    | 15.275.000.000         | 6.544.956.900          | 13.794.531.900         | 11.198.457.872             | 87,50                                            | 81,18        |                                            |
|    |         |      | Lingkungan Hidup                                              | 22.250.000.000         | 15.432.544.090         | 19.464.653.341         | 17.776.190.179             | 89,60                                            | 91,33        |                                            |
|    |         |      | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil                | 3.033.934.460          | 2.211.093.841          | 3.856.605.167          | 3.565.874.639              | 97,02                                            | 92,46        |                                            |
|    |         |      | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                  | 4.051.650.900          | 3.119.961.106          | 3.239.286.106          | 2.937.107.849              | 70,90                                            | 90,67        |                                            |
|    |         |      | Perhubungan                                                   | 17.845.000.000         | 7.575.868.597          | 13.836.792.520         | 13.371.765.525             | 91,68                                            | 96,64        |                                            |
|    |         |      | Komunikasi dan Informatika                                    | 2.149.395.503          | 1.211.756.454          | 1.793.005.690          | 1.501.453.207              | 94,29                                            | 83,74        |                                            |
|    |         |      | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                            | 255.070.000            | 477.628.000            | 619.601.520            | 592.713.000                | 100,00                                           | 95,66        |                                            |
|    |         |      | Penanaman Modal                                               | 2.574.071.330          | 1.149.827.610          | 2.923.399.210          | 2.031.971.900              | 170,12                                           | 69,51        |                                            |
|    |         |      | Kepemudaan dan Olah Raga                                      | 1.801.696.000          | 501.241.600            | 1.617.253.100          | 1.258.607.386              | 59,51                                            | 77,82        |                                            |
|    |         |      | Statistik                                                     | 160.382.651            | 98.027.060             | 140.806.488            | 135.634.660                | 100,00                                           | 96,33        |                                            |
|    |         |      | Persandian                                                    | 40.705.765             | 25.234.000             | 31.009.000             | 31.009.000                 | 100,00                                           | 100,00       |                                            |
|    |         |      | Kebudayaan                                                    | 2.575.404.200          | 465.165.000            | 2.173.814.000          | 1.964.712.610              | 100,00                                           | 90,38        |                                            |
|    |         |      | Perpustakaan                                                  | 1.253.232.200          | 836.146.368            | 1.183.368.718          | 1.082.883.988              | 97,83                                            | 91,51        |                                            |
|    |         |      | Kearsipan                                                     | 254.767.800            | 118.907.324            | 285.981.124            | 261.517.324                | 85,71                                            | 91,45        |                                            |
| 3  |         |      | <b>Layanan Urusan Pilihan</b>                                 | <b>18.375.107.137</b>  | <b>9.049.148.185</b>   | <b>14.262.646.036</b>  | <b>11.331.308.833</b>      | <b>86,61</b>                                     | <b>79,45</b> |                                            |
|    |         |      | Kelautan dan Perikanan                                        | 967.251.000            | 1.134.962.971          | 2.909.074.955          | 2.697.504.631              | 89,67                                            | 92,73        |                                            |
|    |         |      | Pariwisata                                                    | 6.252.022.000          | 3.259.725.934          | 4.635.139.234          | 2.902.882.741              | 97,22                                            | 62,63        |                                            |
|    |         |      | Pertanian                                                     | 2.476.995.000          | 1.419.730.853          | 1.838.784.837          | 1.112.226.358              | 68,23                                            | 60,49        |                                            |
|    |         |      | Perdagangan                                                   | 6.504.439.200          | 2.327.983.770          | 3.075.049.020          | 2.958.304.531              | 79,17                                            | 96,20        |                                            |
|    |         |      | Perindustrian                                                 | 2.174.399.937          | 906.744.657            | 1.804.597.990          | 1.660.390.572              | 98,75                                            | 92,01        |                                            |
| 4  |         |      | <b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>                   | <b>158.998.213.300</b> | <b>112.686.090.371</b> | <b>170.881.505.798</b> | <b>145.642.168.883</b>     | <b>91,59</b>                                     | <b>85,23</b> |                                            |
|    |         |      | Administrasi Pemerintahan                                     | 134.488.672.301        | 93.652.241.338         | 138.332.548.691        | 120.884.952.164            | 89,99                                            | 87,39        |                                            |
|    |         |      | Pengawasan                                                    | 3.069.400.000          | 1.419.363.789          | 3.069.400.000          | 2.776.733.072              | 99,44                                            | 90,47        |                                            |
|    |         |      | Perencanaan Pembangunan                                       | 5.440.140.999          | 2.000.537.179          | 4.642.101.415          | 4.250.765.525              | 90,22                                            | 91,57        |                                            |
|    |         |      | Keuangan                                                      | 12.600.000.000         | 13.901.233.925         | 22.469.181.098         | 15.554.270.060             | 83,11                                            | 69,22        |                                            |
|    |         |      | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan                    | 3.400.000.000          | 1.712.714.140          | 2.368.274.594          | 2.175.448.062              | 95,16                                            | 91,86        |                                            |
|    |         |      |                                                               | <b>526.778.990.623</b> | <b>415.096.740.287</b> | <b>572.195.978.060</b> | <b>503.147.266.789</b>     | <b>91,58</b>                                     | <b>87,93</b> |                                            |

Laporan Kinerja Kota Pangkalpinang bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 445/KEP/BAPPEDA-LITBANG/IX/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 berjumlah 22 (dua puluh dua) sasaran dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap 22 (dua puluh dua) sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) indikator yang diperjanjikan di tahun 2020 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

| No. | Sasaran                                      | Indikator Kinerja                                                                 | Capaian Kinerja 2020 (%)   |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan | Persentase pertumbuhan PDRB Sektor:<br>▪ Pariwisata,<br>▪ Perdagangan,<br>▪ Jasa. | NA<br>-128,16%<br>-528,07% |
| 2.  | Meningkatkan pertumbuhan investasi           | 2. Nilai investasi                                                                | 5.832,55%                  |
| 3.  | Terkendalinya laju inflasi                   | 3. Angka Inflasi                                                                  | 191%                       |
| 4.  | Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk   | 4. Indeks gini                                                                    | 91,6%                      |

|     |                                                                                        |                                                                    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.  | Menurunnya tingkat pengangguran                                                        | 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                              | 61,40%  |
| 6.  | Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat                                           | 6. PDRB perkapita                                                  | 103,09% |
| 7.  | Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin                              | 7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial | 251,57% |
| 8.  | Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana      | 8. Indeks risiko bencana                                           | 92,50%  |
| 9.  | Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkara                                       | 9. Persentase penegakan Perda                                      | 103,09% |
| 10. | Menekan angka penyalahgunaan narkoba                                                   | 10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba                        | 197,06% |
| 11. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan                        | 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)   | -       |
|     |                                                                                        | 12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah          | -       |
| 12. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | 13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                     | NA      |
|     |                                                                                        | 14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)          | NA      |
|     |                                                                                        | 15. Indeks Profesionalitas ASN                                     | 68,65%  |
| 13. | Meningkatnya kualitas pendidikan                                                       | 16. Rata-rata lama sekolah (RLS)                                   | 100,10% |
|     |                                                                                        | 17. Harapan lama sekolah                                           | 101,70% |
| 14. | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                              | 18. Usia Harapan Hidup                                             | 100,18% |
| 15. | Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak                            | 19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD            | 10%     |
|     |                                                                                        | 20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD          | 30%     |
| 16. | Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan  | 21. Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan              | 100,40% |

|     |                                                                            |                                                                                                                        |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                            | manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )                                                                                   |         |
|     |                                                                            | 22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda. | 108,28% |
| 17. | Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran                               | 23. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)                                                                                  | 104,76% |
| 18. | Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga                                 | 24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti                               | 129,40% |
| 19. | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah                    | 25. Persentase seni budaya yang dilestarikan                                                                           | 100%    |
| 20. | Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan | 26. Persentase jalan dalam kondisi baik                                                                                | 126,26% |
|     |                                                                            | 27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik                                                     | 86,95%  |
| 21. | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni       | 28. Luasan Areal Kawasan Kumuh                                                                                         | 243%    |
|     |                                                                            | 29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi                                                                         | 100,57% |
|     |                                                                            | 30. Rasio rumah layak huni                                                                                             | 105,69% |
| 22. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | 31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani                                                 | 142,28% |
|     |                                                                            | 32. Indeks kualitas air                                                                                                | 80%     |
|     |                                                                            | 33. Indeks kualitas udara                                                                                              | 92%     |

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Pangkalpinang di tahun 2020 tidak terlepas dari proses pembelajaran atas hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Namun demikian, hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung serta kemampuan

organisasi/aparatur yang ada. Menyadari hal itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang meningkatkan strategi pemecahan yang lebih efektif, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang, hambatan serta kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat diminimalisir sedini mungkin.

Dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis itu terepresentasi dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun beberapa simpulan yang dapat diuraikan menyangkut hal-hal di bawah ini.

1. Dalam perumusan kebijakan, sangat disadari bahwa sulit untuk memprediksi jumlah kebijakan yang akan ditetapkan dalam suatu tahun berjalan. Upaya ini sifatnya berkesinambungan guna menyiapkan berbagai landasan hukum bagi seluruh instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, penyusunannya melibatkan berbagai *stakeholders* baik internal maupun eksternal serta masyarakat secara khusus, dengan persepsi serta pemahaman yang beragam sehingga seringkali membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang berusaha untuk selalu menetapkan berbagai kebijakan sesuai dengan permasalahan dan tantangan serta tetap mengacu pada dokumen RPJMD 2018-2023.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh komponen pemerintah kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, civitas akademik, *civil society* sebagai bagian integral dalam sistem administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan dengan kategori kurang berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya dari hasil perhitungan capaian sasaran. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang tahun 2020. Semoga LAKIP Kota Pangkalpinang tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

**PANGKALPINANG,     MARET 2021**  
**WALIKOTA PANGKALPINANG**



**H. MAULAN AKLIL**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*Jalan Rasa Kunda No. 05 Pangkalpinang Telepon / Faksimile (0717) 422770 Kode Pos 33143*  
*Website : <http://inspektorat.pangkalpinangkota.go.id> , email : [inptkotapkp@gmail.com](mailto:inptkotapkp@gmail.com)*

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KOTA PANGKALPINANG**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pangkalpinang, Maret 2021

Inspektur Daerah  
Kota pangkalpinang



Suhaimi, SH, MH  
Pembina Tk I / IVb

NIP. 19710319 200501 1 004